

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENGELOLAAN KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA
DI MASA PANDEMI COVID-19
GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**

Oleh:

YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO, S.H., M.Si
KOMBES POL. NRP. 70100400

**KERTAS KARYA PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“PENGELOLAAN KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA DI MASA PANDEMI COVID-19 GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL“**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn.) Ir. Sary Sutaat dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Juli 2021

Penulis



YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO, S.H., M.Si

KOMBES POL NRP. 70100400



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Hondawantri Naibaho, S.H., M.Si

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri

Instansi : Polri

Alamat : Jln. Karya Wisata Perumahan Luxor Blok C No. 31 Medan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2021

Penulis Taskap



YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO, S.H., M.Si
KOMBES POL NRP. 70100400

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Yusuf Hondawantri Naibaho, S.H., M.Si
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Judul Taskap : Pengelolaan Kampung Tangguh Nusantara Di Masa Pandemi
Covid-19 Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

""coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, *23 Mei* 2021
Tutor Taskap



Mayjen TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat
Tenaga Profesional Bidang
Ketahanan Nasional dan Ilmu
Pengetahuan & Teknologi
Lemhannas RI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Maksud dan Tujuan	8
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	8
5. Metode dan Pendekatan	9
6. Pengertian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	12
8. Peraturan Perundang-undangan	12
9. Kerangka Teoritis	15
10. Data dan Fakta	17
11. Lingkungan Strategis	23
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	30
13. Program Potensial dengan Perencanaan yang Lebih Matang	31
14. Pengorganisasian Kampung Tangguh Nusantara...	37
15. Pelaksanaan dan Pengawasan Kampung Tangguh Nusantara	48
16. Kampung Tangguh Nusantara Penguat Stabilitas Keamanan Wilayah.....	51
17. Hasil Analisa	55

BAB IV PENUTUP

18.	Simpulan	58
19.	Rekomendasi	59



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	REALISASI KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA
TABEL 2.2	KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 TIMELINE PEMBENTUKAN KAMPUNG TANGGUH
NUSANTARA 2020

GAMBAR 3.2 ALUR KOORDINASI PEMBENTUKAN KAMPUNG
TANGGUH NUSANTARA



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah memunculkan tantangan baru yang bersifat global. Karakteristik virus Covid-19 yang sangat cepat menyebar, menjangkiti dan bahkan menimbulkan korban jiwa menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa virus ini akan menjadi ancaman dan memunculkan wabah dalam skala global. Ketakutan dunia tersebut pada akhirnya menjadi sebuah realita ketika sejak awal tahun 2020, wabah virus Covid-19 menyebar secara masif ke berbagai negara di dunia. Hal ini memaksa organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa wabah penyakit yang diakibatkan virus corona COVID-19 sebagai pandemi global.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus infeksi pertama virus Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu dinyatakan bahwa ada dua warga negara Indonesia yang telah dinyatakan positif terpapar virus Covid-19. Sekalipun kedua orang tersebut sudah menjalani perawatan dan ditempatkan di kamar isolasi, namun angka paparan virus tersebut kemudian terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Dalam perjalanan waktu, seiring terus bertambahnya masyarakat yang terpapar oleh virus Covid-19, jumlah penderita yang meninggal pun turut meningkat. Data terakhir per tanggal 27 Maret 2021, jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar Covid-19 mencapai 1.496.085 orang dengan angka kematian mencapai 40.449 orang. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki angka penyebaran dan jumlah korban meninggal akibat Covid-19 terbanyak dibandingkan negara-negara tetangga di sekitarnya.¹

Ancaman Covid-19 menjadi salah satu ancaman global yang tidak ada satu negara pun siap dalam menghadapinya. Sejak awal Covid-19 menjadi pandemi global, berbagai negara merespon dan berupaya mencegah dan menghentikan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Berbagai

¹ <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diunduh pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 07.00 WIB.

kebijakan pun telah diimplementasikan, mulai kebijakan menjaga jarak, membatasi aktivitas sosial masyarakat, melarang berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan, kewajiban untuk memakai masker dan mencuci tangan hingga ada sejumlah negara yang mengambil kebijakan ekstrim berupa *lockdown* atau menutup lalu lintas pergerakan manusia dalam satu wilayah hingga satu negara. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mencoba melakukan berbagai kebijakan guna meredam penyebaran Covid-19, mulai dari memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan berbagai ketentuan pembatasan yang mengalami beberapa kali evaluasi dan penyempurnaan hingga pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro yang kini masih diterapkan di sejumlah daerah.

Bangsa ini seakan tengah diuji daya tahan dan ketangguhannya dalam mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini karena pandemi Covid-19 tidak hanya memunculkan ancaman berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia, namun terus menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek sosial ekonomi yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional. Pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat yang awalnya dilakukan guna mengendalikan resiko penyebaran dan penularan virus di tengah masyarakat, telah mengakibatkan roda perekonomian Indonesia nyaris lumpuh. Banyak pelaku usaha harus menutup usahanya, para pekerja kehilangan pekerjaannya, dan tidak sedikit masyarakat harus mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.

Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga pemerintah yang didirikan untuk menyelenggarakan tugas mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial, Polri dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Selain bertugas untuk menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri juga dituntut mampu menjalankan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai apa yang diperintahkan oleh undang-undang.² Dalam

² Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia BAB III Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

memberikan jaminan stabilitas keamanan nasional, Polri memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan penanganan pandemi Covid-19. Sejak awal, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Kemudian jajaran Polri ikut serta dalam memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna menangani pandemi. Hal ini diperlukan agar masyarakat bisa lebih mengerti dan muncul kesadaran untuk mematuhi sejumlah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

Dalam penanganan virus Covid-19, kepatuhan dan kekompakan masyarakat dalam mengikuti setiap kebijakan yang diatur oleh pemerintah menjadi kunci berhasil atau tidaknya penanganan Covid-19 secara nasional. Oleh sebab itu, Polri menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan agar penanganan Covid-19 yang telah dicanangkan pemerintah bisa diketahui, dimengerti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Setidaknya ada enam perintah Kapolri kepada jajarannya terkait penanganan Covid-19. Pertama, melakukan analisis dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19; Kedua, senantiasa menjalin komunikasi, kerja sama dan kolaborasi dengan instansi terkait; Ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat; Keempat, melakukan pembinaan untuk membangun Kampung Tangguh Nusantara di wilayah masing-masing; Kelima, meningkatkan kerja sama dalam menjalankan operasi yustisi penerapan protokol kesehatan; Keenam, pelajari, pedomani dan implementasi di lapangan, yang penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kearifan lokal di wilayah masing-masing.

Salah satu program unggulan Polri terkait penanganan Covid-19 adalah program Kampung Tangguh Nusantara. Program Kampung Tangguh awalnya merupakan program yang diinisiasi dan disusun oleh Polda Jawa Timur bersama Universitas Brawijaya dan sejumlah jajaran terkait dengan nama Program Kampung Tangguh Semeru. Dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, program Kampung Tangguh dibuat dengan

melibatkan peran serta masyarakat sebagai ujung tombak inovasi ini. Program ini merupakan upaya komunal yang bersifat gotong royong dalam melawan corona berbasis lingkungan RT/RW. Masyarakat secara langsung dilibatkan untuk menjaga kampungnya dari penularan Corona. Program yang juga melibatkan Universitas Brawijaya ini awalnya merupakan satu terobosan yang dibuat untuk memunculkan ketangguhan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19 secara lebih mandiri, mengingat sangat sulit untuk memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Pada sisi lain, semua sadar bahwa pemerintah memiliki berbagai keterbatasan dalam membantu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Hal inilah yang melatarbelakangi bahwa harus ada upaya gotong royong hingga level kampung atau *grass root* dalam penanganan Covid-19. Konsep Kampung Tangguh sendiri memiliki tujuh kriteria ketangguhan, yaitu tangguh logistik, tangguh sumber daya manusia (SDM), tangguh informasi, tangguh kesehatan, tangguh keamanan dan ketertiban, tangguh budaya, dan tangguh psikologis.

Masyarakat diajak untuk mengedukasi, mengawasi dan menjamin terlaksananya protokol kesehatan di lingkungannya. Saat memasuki kampung, masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, yakni mencuci tangan dengan sabun, wajib menggunakan masker, pemberlakuan jam malam hingga penyediaan rumah karantina. Masyarakat dibina untuk membentuk satgas yang tidak hanya bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungannya, juga bertugas membantu melakukan praktek 3T (*tracing, testing* dan *treatment*), mulai dari membantu mengidentifikasi dan melaksanakan pengetesan terhadap masyarakat yang diduga terpapar, menyiapkan dan membantu proses karantina mandiri, hingga menyiapkan logistik bagi mereka yang menjalani karantina.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk ketangguhan logistik, masyarakat pun diajak untuk mengupayakan ketahanan pangan secara mandiri di lingkungannya dengan menanam berbagai macam sayuran hingga beternak ikan atau unggas secara gotong royong. Tujuannya, selain untuk menjamin ketersediaan pasokan makanan bagi warga, juga untuk membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Keberhasilan program Kampung Tangguh Semeru oleh jajaran Polda Jawa Timur khususnya dalam menghadapi lonjakan penyebaran Covid-19 di Jawa timur pada awal masa pandemi mendapat supervisi dari Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH, MH lalu menjadikan sebagai rule model pembentukan Kampung Tangguh di seluruh Polda. Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Telegram Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, M.Si No : 1635/VI/OPS.1.1.1./2020 Tanggal 9-6-2020, tentang Pembentukan KTN sebagai Pilot Project seluruh Polda untuk ikut mengimplementasikan di wilayah masing-masing. Kini setidaknya seluruh Polda sudah berhasil mengembangkan program kampung tangguh di berbagai daerah. Polda Jawa Timur dengan kampung Tangguh Semeru, Polda Kalimantan Selatan memiliki program Kampung Tangguh Banua, Polda Kalimantan Tengah memiliki Desa Pantang Mundur, Polda Sumatra Utara memiliki program Kampung Paten Toba, sementara Polda Jawa Tengah memiliki Kampung Siaga Covid-19, dan Polda Metro Jaya memiliki program Kampung Tangguh Jaya di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.

Penguatan ketangguhan, kegotong-royongan dan kemandirian dalam mengatasi berbagai persoalan terkait pandemi Covid-19 juga sempat disinggung Presiden Joko Widodo sendiri dalam pidato pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional 2020, di Jakarta, Sabtu (31/10/2020).³ Presiden mengajak masyarakat Indonesia untuk menghidupkan kembali budaya tangguh bencana dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kearifan Nusantara dinilai terbukti mampu menjaga keberlangsungan masyarakat Nusantara selama ini sekalipun bermukim di atas wilayah yang memiliki banyak potensi bencana. Sikap optimistis dan pantang menyerah bangsa Indonesia ini terbentuk dari kondisi geografis Nusantara yang menantang. Terhadap berbagai tantangan nyata tersebut, nenek moyang bangsa Indonesia selama berabad-abad berusaha bersahabat dan senantiasa menjaga harmoni dengan alam lingkungan sekaligus membangun kebudayaan dan nilai-nilai keutamaan di atasnya.

³ <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/10/31/presiden-hidupkan-budaya-tangguh-bencana/> diunduh pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 21.00 WIB.

Hal itulah yang diyakini telah membuat bangsa Indonesia tangguh, menghargai perbedaan, kreatif, dan kaya budaya yang didalamnya sering kali terdapat berbagai kearifan lokal dalam mengatasi beragam situasi bencana. Oleh sebab itu, dalam menghadapi pandemi Covid-19, memori budaya sebagai masyarakat tangguh bencana perlu kembali dihidupkan. Selama ini masyarakat tanpa ada yang memerintah telah menunjukkan rasa solidaritas, gotong royong, dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi. Berbagai upaya untuk saling membantu terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi sudah banyak disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan lain, dalam buku Laporan Tahunan 2020, Presiden juga mengapresiasi konsep Kampung Tangguh, sebagai inisiatif masyarakat untuk mengatasi masalah secara mandiri, menguatkan silaturahmi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari ruang isolasi, posko kesehatan, dapur umum, hingga lumbung pangan dapat dimanfaatkan secara bersama. Pemenuhan kebutuhan tersebut membentuk karakter baru yang patuh protokol kesehatan, karena muncul dari praktek hidup keseharian bersama tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat diyakini akan lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan sendirinya tanpa perlu dihimbau kembali. Dengan demikian, keberagaman suku, agama, dan bahasa menjadi bagian perekat nasional.⁴

Permasalahannya, pengembangan Kampung Tangguh pada awalnya merupakan pendekatan penanganan Polri dan sejumlah instansi terkait terhadap wilayah-wilayah yang termasuk dalam zona merah penyebaran Covid-19. Itu artinya selama ini, Kampung Tangguh Nusantara baru diimplementasikan pada RT/RW atau desa yang sebelumnya memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi dan tidak dibangun secara masif di semua daerah untuk mewujudkan ketangguhan di tengah masyarakat secara merata. Selain itu, implementasi konsep Kampung Tangguh selama ini belum dikelola dan direncanakan dengan optimal. Sekalipun sudah ada

⁴ Laporan Tahunan Presiden RI 2020 bertajuk “Bangkit untuk Indonesia Maju” diakses dari <https://www.presidentri.go.id/assets/documents/laporan-tahunan-2020.pdf> pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 20.00 WIB.

semacam buku panduan tata cara membangun kampung tangguh, namun belum ada satu mekanisme training to trainer yang masif, sehingga kualitas implementasi di satu tempat dengan tempat yang lain menjadi beragam. Pembangunan kampung tangguh juga selama ini masih belum direncanakan secara matang. Upaya untuk menyinergikan berbagai sumber daya yang ada belum dilakukan secara maksimal. Hal ini menjadikan pelaksanaan dan implementasi Kampung Tangguh Nusantara tidak selalu berjalan baik. Kurangnya pengendalian dan evaluasi terhadap apa yang terjadi di lapangan pada akhirnya membuat implementasi Kampung Tangguh Nusantara belum sepenuhnya bisa dibangun dan dikelola secara efektif dan efisien di setiap daerah.

Kondisi ini patut disayangkan mengingat pendekatan Kampung Tangguh Nusantara yang menonjolkan keterlibatan penuh masyarakat dalam menghadirkan kemandirian dan ketangguhan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama masa pandemi adalah satu konsep yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Pandemi ini hanya bisa diatasi jika semua komponen bangsa ikut berpartisipasi aktif, bergotong-royong, bahu membahu untuk saling menjaga dan meringankan beban, satu dengan lainnya. Pembinaan terhadap ketangguhan dan kemandirian masyarakat inilah yang sebenarnya perlu dilakukan secara lebih terencana dan terorganisir sehingga pelaksanaan dan pengendalian program Kampung Tangguh dapat berjalan lebih optimal. Bagi Polri sendiri, pembinaan dan pendampingan dalam membangun Kampung Tangguh merupakan bentuk bakti Polri dalam melayani masyarakat agar masyarakat menjadi siap dan tangguh menghadapi berbagai kondisi dan tantangan selama masa pandemi. Kondisi kesiapan dan kemampuan masyarakat tersebut pada akhirnya akan meminimalisir berbagai persoalan sosial yang pada akhirnya berujung pada terwujudnya stabilitas keamanan nasional di Indonesia.

2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah “**Bagaimana**

pengelolaan kampung tangguh nusantara di masa pandemi Covid-19 guna menjaga stabilitas keamanan nasional?”

Dalam rangka memudahkan analisa dan pembahasan, rumusan permasalahan di atas dijabarkan ke beberapa pertanyaan kajian dan persoalannya, sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi kendala dalam perencanaan program Kampung Tangguh Nusantara selama ini?
- b. Bagaimana mengorganisasikan Kampung Tangguh Nusantara yang lebih baik dan optimal?
- c. Bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan dan pengendalian Kampung Tangguh Nusantara agar dapat semakin baik dan berkontribusi kepada stabilitas keamanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan kampung tangguh nusantara di masa pandemi Covid-19 dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan yang berkepentingan mengenai pengelolaan kampung tangguh nusantara di masa pandemi Covid-19 sehingga dapat optimal dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 sekaligus guna menjaga stabilitas keamanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup pembahasan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini dibatasi pada peran Polri bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan kampung tangguh nusantara di masa pandemi Covid-19 guna menjaga stabilitas keamanan nasional.

Uraian pembahasan dan analisa terhadap permasalahan di dalam penulisan Taskap akan disusun dengan sistematika atau tata urutan sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini dibahas tentang peraturan perundang-undangan, pengaruh lingkungan strategis, kerangka teoritis dan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan pemecahan persoalan berkaitan dengan pengelolaan kampung tangguh nusantara di masa pandemi Covid-19 guna menjaga stabilitas keamanan nasional yang dinilai masih belum optimal.

c. BAB III: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan setiap persoalan yang ada berkaitan dengan penanganan pengelolaan Kampung Tangguh Nusantara saat ini. Kemudian dengan menggunakan landasan teori yang ada, akan dianalisa dan dirumuskan sejumlah usulan kebijakan dan strategi terkait dengan sejumlah upaya optimalisasi pengelolaan kampung tangguh nusantara di masa pandemi Covid-19 guna menjaga stabilitas keamanan nasional.

d. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian penulisan dan beberapa saran yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Proses pencarian, pengumpulan dan penelitian data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai tulisan akademis berupa arsip, artikel ilmiah baik

on line maupun *off line* dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dalil-dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan.

- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Gotong Royong**, merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan seperti termaktub dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dijelaskan bahwa etika sosial budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong di antara sesama manusia dan warga negara.⁵
- b. **Keamanan nasional**, adalah kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.⁶
- c. **Kearifan lokal**, mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat.⁷
- d. **Mandiri**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri memiliki pengertian dalam keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.⁸

⁵ http://etheses.uin-malang.ac.id/1684/6/11410145_Bab_2.pdf diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

⁷ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/094c38353e4aaa6691067abdc34c1d5c.pdf diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

⁸ <https://kbbi.web.id/mandiri> diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

- e. **Pandemi**, adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah Covid-19.⁹
- f. **Pengelolaan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan memiliki arti proses, cara, atau perbuatan mengelola. Lebih jauh pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰
- g. **Stabilitas**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stabilitas mengandung pengertian kemantapan, kestabilan atau keseimbangan.¹¹
- h. **Tangguh**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tangguh memiliki arti sukar dikalahkan, kuat dan andal.¹²
- i. **Kampung**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampung memiliki arti kelompok rumah yang merupakan bagian kota ; Desa ; dusun ; kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.¹³



⁹ <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi> diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/kelola> diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

¹¹ <https://kbbi.web.id/stabilitas> diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

¹² <https://kbbi.web.id/tangguh-2> diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

¹³ <https://kbbi.web.id/kampung-2> diunduh pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 12.05 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pembentukan kampung tangguh pada awalnya memang diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang termasuk dalam zona merah. Namun seiring berjalannya waktu, program ini terus diperluas ke desa-desa yang masuk dalam zona oranye, bahkan hingga ke seluruh desa. Pendekatannya adalah sekalipun saat ini vaksinasi Covid-19 sudah mulai dijalankan, namun keberadaan Kampung Tangguh tetap dianggap penting guna membendung euforia berlebihan dari warga di masa transisi menuju normal baru. Situasi ini tanpa disadari kerap membuat masyarakat mulai mengendurkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Perilaku tersebut berpotensi akan memicu kembali meledaknya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Apabila hal ini terjadi, maka harapan pemerintah bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia menjadi gagal. Konsekuensinya, pandemi akan berlangsung lebih lama dan hal ini akan berpotensi pada meningkatnya gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional.

Sebelum dapat menganalisa apa yang menjadi pokok persoalan terkait pengelolaan kampung tangguh nusantara di masa pandemi Covid-19 terlebih dahulu perlu disajikan berbagai regulasi perundang-undangan yang selama ini menjadi landasan hukum, faktor lingkungan strategis yang berpengaruh hingga sejumlah teori yang dapat menjadi landasan dalam pemecahan persoalan.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara pada Pasal 5 diamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam regulasi ini dijelaskan mengenai pembagian tugas urusan pemerintahan bidang sosial yang menyatakan bahwa dalam penanganan bencana, pemerintah pusat memiliki tugas untuk membuat model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Sementara pemerintah daerah kota/kabupaten memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah kota/kabupaten.

e. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa keekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Dalam pasal 21 ayat (1), peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah dapat dilakukan dalam bentuk: a) memberikan informasi adanya penderita penyakit wabah; b) Membantu kelancaran pelaksanaan upaya wabah; c) Menggerakkan motivasi masyarakat penanggulangan wabah; d) kegiatan lainnya. Pada ayat (2) peranserta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.

g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

h. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Regulasi ini memberikan pedoman bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana. Hal ini merupakan suatu upaya mengurangi resiko bencana berbasis komunitas yang dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Program ini membutuhkan disinergikan dengan perencanaan pembangunan yang ada.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Manajemen

Menurut Stoner dalam Wijayanti (2008), manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi.¹⁴ Sementara Terry (2005) memberi pengertian bahwa manajemen adalah sebuah proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang menuju ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.¹⁵ Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Siagian (2010), manajemen merupakan kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disarikan bahwa manajemen menurut para ahli adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen terdiri dari sedikitnya meliputi tujuh unsur, yaitu *man, money, method, machine, market, material* dan *information*.¹⁷

Dalam Taskap ini, pokok permasalahan akan coba dianalisa menggunakan pendekatan fungsi manajemen guna menghasilkan satu konsep program Kampung Tangguh yang lebih baik dan efektif. Keempat

¹⁴ Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. Manajemen. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press

¹⁵ Terry, George R. 2005. Dasar-Dasar Manajemen (penerjemah, G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara

¹⁶ Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁷ <https://eprints.uny.ac.id/9870/2/BAB%20%20-%2006209241002.pdf> diunduh pada tanggal 10 April 2021 pukul 18.00 WIB

fungsi manajemen tersebut meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

b. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat mandiri melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.¹⁸

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005) ada lima jenis, yaitu:¹⁹

- 1) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) Partisipasi: dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- 3) Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- 4) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- 5) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

¹⁸ Gunawan Sumodiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

¹⁹ Sutrisno, D. 2005. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

c. Teori Sinergitas

Menurut Deardorf dan Williams (2006), sinergitas adalah suatu proses interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual.²⁰

Konsep sinergitas muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis. Menurut Slamet Mulyana (2008), bentuk sinergitas dapat diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Koordinasi, Dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara *stakeholder* terkait apakah bersifat hubungan vertikal, hubungan horisontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.²¹

10. Data dan Fakta

a. Mengenal Kampung Tangguh Nusantara

Kampung Tangguh Nusantara merupakan bentuk *problem oriented policing* yang dijalankan oleh institusi Polri di seluruh wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk membina masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya khususnya selama masa pandemi Covid-19. Program ini dicanangkan dan mulai dipersiapkan secara nasional sejak bulan Juni 2020.

Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang tidak diketahui kapan berakhirnya, serta keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi menjadi latar

²⁰ Deardorff, D.S., & Williams, G. 2006. Synergy Leadership in Quantum Organizations. California: Fesserdorff Consultants.

²¹ Firmansyah, MI. 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara BPJS Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga Surabaya, Volume 4, Nomor 2, Edisi Mei-Agustus 2016, Halaman 146-156

belakang dicetuskannya program Kampung Tangguh Nusantara. Program ini akan menjadi upaya Polri bersama *stakeholder* yang ada untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul selama pandemi. Pada awalnya, lokasi yang dipilih sebagai sasaran implementasi Kampung Tangguh Nusantara adalah lokasi yang menjadi pusat episentrum penyebaran Covid-19 yaitu sejumlah kampung atau desa yang ada di zona merah Covid-19.

Sebelum menjadi satu program yang diadaptasi secara nasional, Kampung Tangguh merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, bersama Kodam Brawijaya, Universitas Brawijaya dan pemerintah daerah setempat guna mengatasi penyebaran virus Covid-19 yang mengalami penyebaran yang sangat masif. Program yang kemudian diberi nama Kampung Tangguh Semeru tersebut pada saat itu dinyatakan cukup berhasil dalam membangun ketangguhan dan kemandirian di tengah masyarakat. Bukan hanya dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan dan upaya 3T (*tracing, testing, and treatment*) sehingga tingkat penularan Covid-19 dapat diredam, tapi juga mampu mengatasi berbagai permasalahan penyerta lainnya.

Ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19, menuntut kesiapan masyarakat agar tangguh melakukan perlawanan jangka panjang yang sistemik, masif, dan efektif sehingga sumberdaya pemerintah yang relatif terbatas tidak terkuras dalam waktu cepat. Singkatnya, kampung tangguh ini merupakan upaya untuk memperkuat aksi melawan Covid 19 yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat semampu mereka, meskipun akan menjadi gerakan lebih cepat dan lebih baik apabila mendapat dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah serta aparat di lapangan. Hal tersebut penting dalam menerjemahkan konsep kebijakan agar gerakan menjadi lebih terarah, efisien, efektif dan terukur, bukan hanya pada sisi materi, namun juga dari sisi waktu dan SDM.²²

²² Tim Satgas Covid-19 UB. 2020. Pedoman Pengoperasian Kampung Tangguh: Langkah Sistemik Melawan Pandemi Covid-19. Malang: Universitas Brawijaya

NO	POLDA	JMLH KECAMATAN	JMLH DESA/KEL	JMLH BHABIN	JMLH KTN	PERSENTASE KTN
1	JATENG	537	8562	4228	8877	103.68%
2	SUMSEL	236	3240	1369	3145	97.07%
3	JATIM	666	8501	6031	1887	22.20%
4	JABAR	627	5806	4529	2139	36.84%
5	NTB	116	1140	1138	1137	99.74%
6	DKI JAKARTA	44	841	898	338	40.19%
7	SULSEL	307	3047	1399	2839	93.17%
8	RIAU	166	1859	1001	135	7.26%
9	DIY	78	438	449	443	101.14%
10	BANTEN	155	1378	679	152	11.03%
11	KALSEL	153	2008	874	85	4.23%
12	BABEL	47	391	393	392	100.26%
13	JAMBI	141	1562	481	48	3.07%
14	SUMBAR	179	1158	873	46	3.97%
15	MALUKU	118	1233	545	29	2.35%
16	SUMUT	444	6110	1167	264	4.32%
17	SULTRA	219	2288	588	25	1,09%
18	SULUT	171	1839	690	866	47,09%
19	KALTIM	103	1038	616	22	2.12%
20	NTT	309	3353	792	21	0.63%
21	ACEH	289	6497	2145	112	1.72%
22	KALBAR	174	2130	881	30	1.41%
23	LAMPUNG	228	2640	1478	16	0.61%
24	PAPUA BARAT	218	1837	768	16	0.87%
25	KALTENG	136	1571	665	711	45.26%
26	SULTENG	175	2017	1040	13	0.64%
27	PAPUA	560	5521	1043	11	0.20%
28	KEPRI	70	417	243	9	2.16%
29	BALI	57	716	726	108	15.08%
30	MALUT	115	1181	1181	8	0.68%
31	SULBAR	69	648	322	6	0.93%
32	KALTARA	53	482	191	30	6.22%
33	GORONTALO	77	729	373	2	0.27%
34	BENGKULU	128	1513	475	64	4.23%
JUMLAH TOTAL		7094	83691	40271	24026	28.71%

Sumber: Data Anev KTN Korbinmas Baharkam Polri Bulan April 2021

TABEL 2.1 REALISASI KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa dengan semakin diperluasnya jangkauan implementasi Kampung Tangguh Semeru di berbagai kampung dan desa di wilayah Jawa Timur, Kapolri memutuskan untuk mengadopsi program tersebut secara nasional dengan nama Kampung Tangguh Nusantara. Berdasarkan data dari Korbinmas Baharkam Polri, jumlah Kampung Tangguh Nusantara yang berhasil dibangun hingga 28 April 2021 mencapai 24.026 kampung. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan semakin diperluasnya jangkauan program yang semula hanya menysar desa dan kampung yang masuk dalam zona merah Covid-19, kemudian dikembangkan ke desa dan kampung lain yang masuk dalam kategori zona oranye.

Perjalanan Penanganan COVID-19 di Indonesia Pembelajaran & Penyempurnaan Sistem					
	10 April 2020 – 10 Januari 2021	11-25 Januari 2021	26 Jan – 8 Feb 2021	9 Februari – 2 Juli 2021	3-20 Juli 2021
	PSBB	PPKM I	PPKM II	PPKM+PPKM MIKRO+POSKO	PPKM DARURAT
INISIASI PERUBAHAN KEBIJAKAN	Respon cepat atas peningkatan kasus di daerah tertentu	Respon terhadap perbedaan kebijakan antar daerah kurang efektif dalam menekan kasus yang meningkat		Meningkatkan efektivitas pengendalian secara tepat sasaran	Respon peningkatan kasus akibat varian COVID-19 baru
REGULASI	PP, No. 21 Tahun 2020	InMendagri No.1 Tahun 2021	InMendagri No.2 Tahun 2021	InMendagri No. 3 Tahun 2021 & InMendagri No. 4 Tahun 2021	InMendagri No. 15 Tahun 2021
STRATEGI	PPSB yang diusulkan oleh kepala daerah	Pembatasan Mobilitas dan aktivitas masyarakat, sesuai dengan daerah yang masuk pada kriteria tertentu		Pengendalian pada level terkecil	Pembatasan Mobilitas dan aktivitas masyarakat, sesuai dengan daerah yang masuk pada kriteria tertentu
TEKNIS PELAKSANAAN	Kebijakan pembatasan aktivitas luar rumah, jangka waktu pelaksanaan dan kebijakan lain terkait pemberlakuan PSBB menyesuaikan kondisi serta keputusan pimpinan wilayah.	Pembatasan pusat perbelanjaan MAX 19.00 WIB dengan prokes Makan minum di resto 25% Tempat kerja WFO 25% & WFH 75%	Pembatasan pusat perbelanjaan MAX 20.00 WIB dengan prokes Makan minum di resto 25% Tempat kerja WFO 25% & WFH 75%	Pembatasan pusat perbelanjaan MAX 21.00 WIB dengan prokes Makan minum di resto 50% Tempat kerja WFO 50% & WFH 50% Pemberlakuan zonasi untuk menentukan scenario pengendalian skala mikro tingkat RT	Kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah Pemberlakuan 100% WFH sektor non esensial Pusat perbelanjaan ditutup Resto: Larangan makan minum di tempat
WILAYAH PELAKSANAAN	20 Wilayah	77 kab/kota	98 kab/kota	10 kab/Kotels. d. Desa/kelurahan	122 kab/Kota di Jawa Bali

Sumber: Satgas Covid-19 & InMendagri 15/2021

TABEL 2.2 KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Implementasi Kampung Tangguh Nusantara yang memberdayakan keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat pada akhirnya dianggap menjadi satu metode pendekatan penanggulangan Covid-19 yang paling ideal untuk diimplementasikan di Indonesia. Implementasi Kampung Tangguh Nusantara memiliki kesesuaian dengan program penanggulangan Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat

yang kini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, di mana upaya pembatasan dan pengetatan mobilitas masyarakat dipersempit hingga ke tingkat RT/RW yang menjadi episentrum penularan Covid-19. Kebijakan PPKM Mikro dan Kampung Tangguh Nusantara menjadi satu langkah sinergis yang saling mendukung sehingga diharapkan meningkatkan keberhasilan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Artinya Kampung Tangguh Nusantara dapat menjadi sarana untuk membantu masyarakat pada level lokal agar mereka mampu mengorganisir seluruh sumberdaya yang mereka miliki menjadi lebih efektif. Secara prinsip fungsi manajemen terjalin di tengah masyarakat. Jadi posisi organisasi kampung tangguh ini benar-benar menjadi kaki paling bawah pengendalian masyarakat untuk menghadapi perang panjang melawan Covid-19. Pola gerakan Kampung Tangguh Nusantara ini tidak membangun struktur baru, hanya menambah personel dari struktur yang ada dengan ketrampilan dan kompetensi ketangguhan tertentu, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk membangun personel di lapangan.

Pada kondisi normal, konsep kampung tangguh ini juga bisa digunakan untuk kepentingan lain dalam menciptakan ketangguhan lainnya. Sebagai contoh ketangguhan dalam menghadapi bencana alam, di mana masyarakat dibina dan disiapkan agar mampu melakukan mitigasi bencana sekaligus membangun kemampuan masyarakat dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan diri saat terjadi bencana alam. Kampung Tangguh Nusantara juga dapat digunakan untuk membangun ketangguhan dalam mengatasi ancaman stunting atau tengkes yang umumnya disebabkan oleh gizi buruk.

b. Gelombang Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Sejumlah ahli sudah memperingatkan bahwa penyebaran pandemi Covid-19 sangat mungkin untuk datang secara bergelombang, dan tidak ada yang mengetahui berapa banyak gelombang penyebaran Covid-19 yang akan terjadi. Prediksi tersebut bukan tanpa alasan mengingat jika

kembali melihat sejarah wabah penyakit flu Spanyol yang pernah menjadi pandemi global pada tahun 1918, juga terjadi dalam tiga gelombang penularan. Wabah Flu Spanyol diperkirakan menjangkiti tidak kurang 500 juta orang di dunia dan menewaskan 50 juta orang diantaranya.²³

Menurut data yang dimiliki Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS), terjadi tiga gelombang penyebaran flu Spanyol di AS. Gelombang pertama terjadi pada musim semi 1918. Pada gelombang pertama, penularan relatif bersifat lokal lalu mereda. Ketika grafik penyebaran mulai menurun inilah, banyak orang pada saat itu, salah memperhitungkan dan menyangka bahwa wabah flu sudah benar-benar berakhir. Hal tersebut mendorong AS yang pada saat itu terlibat Perang Dunia I memobilisasi pasukan secara besar-besaran ke Eropa. Ratusan ribu tentara AS menyeberangi Samudra Atlantik untuk berperang. Mobilisasi massal ini menyebabkan penyebaran flu Spanyol cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia yang tengah dilanda perang. Pada gelombang kedua yang terjadi pada musim gugur 1918 ini memiliki dampak yang lebih dahsyat dan mematikan dibandingkan gelombang pertama. Sementara gelombang ketiga terjadi pada musim dingin 1918 dan berakhir pada musim semi 1919.

Apa yang telah dicatat sejarah, seakan kembali berulang. Menurut situs Worldometers.info, India telah mengalami puncak penularan pandemi Covid-19 pada 11 September 2020 dengan angka penularan harian mencapai 97.654 kasus. Seiring semakin menurunnya angka penularan dalam beberapa waktu kemudian, membuat pemerintah dan masyarakat India terlenta untuk mengundurkan kewaspadaan mereka terhadap pandemi Covid-19. Puncaknya, pada bulan Februari-Maret 2021, berbagai kegiatan keagamaan dan olahraga yang sifatnya mengumpulkan massa dan membuat kerumunan mulai banyak digelar. Penurunan angka penyebaran Covid-19 yang dibarengi oleh kegiatan vaksinasi Covid-19 membuat masyarakat terlenta untuk mulai tidak

²³ <https://www.republika.co.id/berita/qinzf4284/saat-dunia-diguncang-flu-spanyol>

disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hasilnya sejak bulan Maret 2021, angka penularan Covid-19 kembali terjadi dengan cepat menginfeksi lebih banyak orang dalam satu waktu. Puncaknya pada 6 Mei 2021 terjadi rekor penularan harian mencapai 414.433 kasus. Seluruh fasilitas kesehatan di India kolaps karena tidak mampu menampung pasien baru. Hal ini membuat jumlah pasien yang meninggal karena Covid melonjak hingga lebih dari 4.000 orang setiap hari.²⁴

Bila India kini sudah berhasil melewati dua kali gelombang serangan pandemi, Indonesia pada saat tulisan ini dibuat sedang mengalami awal gelombang kedua. Terlepas dari akurasi data resmi yang dikeluarkan pemerintah, Indonesia telah melewati puncak gelombang pertama pandemi Covid-19 pada 30 Januari 2021 dengan jumlah angka penularan harian mencapai 14.518 kasus. Sekalipun sempat mengalami tren penurunan, namun rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yang melarang melakukan perjalanan mudik menjelang perayaan hari keagamaan Idul Fitri 2021. Ketidakpatuhan masyarakat ditambah dengan munculnya mutasi virus Covid-19 strain Delta yang berasal dari India, mengakibatkan kembali melonjaknya angka penularan Covid-19 di Indonesia. Rekor angka penularan harian terus terjadi. Pada Senin 5 Juli 2021, terjadi 29.745 kasus penularan harian, dan menyebabkan 558 orang meninggal dunia. Angka tersebut masih berpotensi untuk terus meningkat seiring belum dipatuhinya anjuran pemerintah agar masyarakat tinggal di rumah.

Hal ini menunjukkan begitu signifikannya peran dan kontribusi masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah mengendalikan dan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Tanpa dukungan dan komitmen dari masyarakat, pandemi Covid-19 akan terus ada di Indonesia.

11. Lingkungan Strategis

²⁴ <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/>

a. Faktor Global

Covid-19 telah menjadi pandemi global. Menurut situs Worldometers.info hingga 12 April 2021, Covid-19 telah menginfeksi 136,6 juta orang dari 219 negara di dunia, yang menyebabkan sedikit 2,9 juta orang meninggal dunia. Statistik ini menunjukkan masifnya penularan Covid-19 secara global yang hingga tulisan ini dibuat belum dapat dikendalikan. Tidak hanya menyebabkan jutaan orang meninggal, pandemi Covid-19 juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, besaran kerugian yang harus ditanggung seluruh negara di dunia sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19 selama enam bulan pertama 2020 sudah mencapai 9 triliun dolar AS hingga 15 triliun dolar AS atau sekitar Rp 133 kuadriliun hingga Rp 222 kuadriliun (kurs Rp 14.800 per dolar AS). Besaran tersebut setara dengan 15 kali ukuran ekonomi Indonesia.²⁵

Penguatan identitas nasional sebagai daya tahan bangsa dalam menghadapi wabah dan krisis ikutan bisa diteladani dari negara-negara yang memiliki kesadaran nasional yang kuat, seperti Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Vietnam, Jerman, dan Selandia Baru. Negara-negara tersebut terbukti menunjukkan efektivitas yang baik dalam menghadapi Covid-19 dibanding negara lain. Kepercayaan kepada pemerintah, kebanggaan diri sebagai bagian dari anak bangsa, dan kesadaran untuk mampu mencapai tujuan secara bersama-sama, menghasilkan satu entitas kolektif terhadap identitas nasional yang kuat, dan terbukti mampu bangkit dari kejatuhan dan aneka krisis.

b. Faktor Regional

Pada tingkat kawasan regional, Indonesia saat ini menjadi negara yang dianggap memiliki nilai buruk dalam penanggulangan pandemi. Lowy Institute, sebuah lembaga kajian kebijakan dari Australia, belum lama ini merilis hasil studinya terkait penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh sejumlah negara. Dalam penelitian tersebut, Selandia

²⁵ <https://www.republika.co.id/berita/qhvjbi383/sri-kerugian-global-akibat-pandemi-capai-rp-222-kuadriliun-diunduh-pada-tanggal-12-april-2021-pukul-20.00-wib>.

Baru dinyatakan sebagai negara terbaik dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dengan skor 94,4, disusul Vietnam, Taiwan dan Thailand. Indonesia mendapat nilai 24,7 dan berada di peringkat 85 dari 95 negara yang dikaji. Indonesia menjadi negara paling buruk penanggulangan pandemi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Bahkan dalam lingkup Asia, Indonesia hanya lebih baik dari tiga negara, yaitu India, Oman dan Iran.²⁶

Vietnam memang sejak awal pandemi dinilai cukup berhasil dalam mengatasi Covid-19. Keberhasilan negara tersebut tidak lepas dari langkah antisipasi cepat yang dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini didukung oleh sistem pemerintahan dan tata negara Vietnam yang memberlakukan kebijakan satu pintu dan komando, sehingga setiap keputusan yang diambil langsung dari pusat secara cepat diterapkan hingga ke tingkat daerah, dan semuanya wajib untuk mengikuti. Langkah tersebut diimbangi dengan ajakan seluruh warganya untuk terlibat aktif untuk bergotong royong dan bersama-sama melawan pandemi COVID-19.²⁷

c. Faktor Nasional

Untuk melihat lebih dalam faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Kampung Tangguh Nusantara di tengah masyarakat, perlu untuk melihat sejumlah aspek yang mempengaruhi seperti tercermin dalam beberapa gatra, yaitu:

1) Geografi.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang wilayah geografinya berbentuk kepulauan. Terdiri dari 17.504 pulau dan terletak di khatulistiwa, posisi Indonesia strategis karena berada di posisi persilangan dua benua dan dua samudra. Indonesia patut bersyukur memiliki wilayah berbentuk kepulauan. Alam sudah

²⁶ <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/01/29/nilai-buruk-penanggulangan-pandemi-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 12 April 2021 pukul 20.00 WIB.

²⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925200741-4-189592/dubes-ri-ungkap-rahasia-sukses-vietnam-perangi-covid-19> diunduh pada tanggal 13 April 2021 pukul 20.00 WIB.

menyediakan sekat-sekat alami berupa laut yang memudahkan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyebaran Covid-19. Bonus geografi dengan sekat-sekat alami yang memisahkan wilayah-wilayah di Indonesia semestinya bisa membantu mengurangi kecepatan transmisi virus antarpulau. Pemerintah hanya perlu melokalisasi pergerakan masyarakat dari satu pulau yang sudah memiliki kasus infeksi agar tidak menjangkau pulau lain yang belum terinfeksi.

2) Demografi

Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Dalam penanganan wabah penyakit, jumlah penduduk yang besar akan menjadi satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Semakin banyak jumlah penduduk di satu negara, maka potensi jumlah korban yang akan terpapar wabah penyakit juga cenderung lebih banyak. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang besar, apabila mampu dikelola dan diatur dengan baik, menjadi satu modal besar yang dimiliki satu bangsa untuk memiliki ketangguhan dalam menghadapi pandemi dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya.

Dalam arti, jika pemerintah dapat membina dan mengarahkan masyarakat untuk dapat memiliki satu ikatan sosial sebagai satu bangsa, sehingga seluruh warga bangsa bisa bergotong royong, bekerja sama untuk mengambil langkah yang sama, maka hal tersebut akan menjadi satu modal besar yang bisa membuat Indonesia segera pulih dan terbebas dari pandemi Covid-19.

3) Ideologi

Situasi pandemi Covid-19 menjadi momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga ketangguhan bangsa Indonesia dalam usaha mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita Bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila memberikan suatu pedoman terhadap pentingnya masyarakat untuk selalu mampu menjalankan salah satu nilai yaitu hidup bergotong royong, saling bahu membahu dan bersolidaritas dengan sesama di sekitarnya. Nilai sikap dan perilaku tersebut saat ini sangat dibutuhkan bangsa ini untuk bisa mengatasi pandemi Covid-19.

4) Ekonomi.

Kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19 yang dilakukan dengan melakukan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat berpengaruh besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Beban ekonomi akibat pandemi muncul tidak hanya akibat membengkaknya biaya intervensi kesehatan masyarakat, perawatan pasien positif, atau kerugian akibat aktivitas ekonomi yang terdisrupsi. Namun juga terkait dengan potensi pendapatan yang hilang akibat menurun drastisnya produktivitas masyarakat. Hal ini membuat ekonomi Indonesia mengalami resesi. Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa potensi kerugian ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi mencapai hampir Rp 1.000 triliun.²⁸

5) Sosial Budaya

Pandemi telah menyebabkan banyak munculnya persoalan sosial di tengah masyarakat, mulai dari dikucilkannya masyarakat terpapar, penolakan terhadap jenazah penderita Covid, pemaksaan kelompok masyarakat untuk membawa sendiri jenazah saudaranya karena percaya bahwa yang bersangkutan tidak terpapar Covid-19

²⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210121/9/1345862/bappenas-total-kerugian-covid-19-hampir-tembus-rp1000-triliun> diunduh pada tanggal 15 April 2021 pukul 22.00 WIB.

sehingga tidak perlu dikubur dengan protap Covid menjadi dinamika sosial yang kerap diberitakan media massa selama pandemi.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lama, telah menyeret Indonesia ke jurang resesi ekonomi. Banyak pelaku usaha gulur tikar, banyak orang kehilangan pekerjaannya, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Pada masa awal pandemi, solidaritas untuk membantu sesama memang sempat muncul secara sporadis di sejumlah wilayah. Banyak masyarakat tergerak untuk membantu masyarakat lain yang mengalami kesulitan perekonomian akibat pandemi, namun solidaritas tersebut cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.

6) Pertahanan dan Keamanan.

Tidak ada satu negara di dunia yang siap menghadapi pandemi Covid-19 termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dan banyak bangsa di dunia belum memiliki kesiapan diri untuk menghadapi bentuk ancaman nonalam seperti wabah penyakit Covid-19. Indonesia tidak hanya belum memiliki sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni, namun hingga kini, bangsa ini juga belum sempat menyusun satu peta jalan bagaimana membangun ketangguhan dalam menghadapi ancaman nonalam.

Pada sisi lain, pandemi Covid-19 juga menimbulkan krisis multidimensi yang berpengaruh pada kondisi keamanan nasional. Terbukti bahwa berdasarkan laporan dari Mabes Polri, terjadi peningkatan gangguan kamtibmas pada awal masa pandemi. Pada minggu ke-18 dan ke-19 tahun 2020, terjadi peningkatan gangguan kamtibmas sebesar 7,06 persen yang didominasi oleh tindak kejahatan jalanan seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, penggelapan, hingga kasus hoaks.²⁹ Angka kriminalitas tersebut bahkan sempat naik hingga sebesar 38,45 persen pada pekan ke-23

²⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.

dan ke-24 di tahun 2020, dari 4.244 kasus pada minggu ke-23, menjadi 5.876 pada minggu ke-24 atau mengalami kenaikan sebanyak 1.632 kasus.³⁰

Selama pandemi Polri dan TNI juga mendapatkan tambahan tugas untuk mengamankan berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Baik dalam memastikan kebijakan dipatuhi masyarakat hingga memastikan tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti dalam hal penyimpanan dan distribusi vaksin.

d. Peluang dan Kendala

1) Peluang

- a) Indonesia memiliki geografi berbentuk kepulauan yang memiliki pembatas laut yang bisa membantu mengurangi potensi penyebaran virus Covid-19.
- b) Ideologi Pancasila mengajarkan pentingnya membina solidaritas, hidup gotong royong dan bekerja sama.
- c) Pada umumnya masyarakat sudah memiliki empati dan jiwa solidaritas terhadap sesama.

2) Kendala

- a) Jumlah penduduk yang besar membuat upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman pandemi lebih berat dan kompleks.
- b) Resesi ekonomi membuat persoalan penanganan pandemi Covid-19 semakin kompleks
- c) Bangsa Indonesia belum memiliki kesiapan yang tangguh dalam menghadapi ancaman non-alam seperti wabah penyakit yang masif seperti Covid-19.

³⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12-514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Salah satu program unggulan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah program Kampung Tangguh Nusantara (KTN). Program ini merupakan pengembangan Kampung Tangguh Semeru yang dilaksanakan Polda Jawa Timur sejak bulan April 2020 lalu. Pada saat itu, Jawa Timur, mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang sangat signifikan. Keberhasilan program Kampung Tangguh Semeru dalam menciptakan ketangguhan dan kemandirian masyarakat Jawa Timur inilah yang kemudian menarik perhatian Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si dengan mengeluarkan Surat Telegram No : 1635/VI/OPS.1.1.1./2020 Tanggal 9-6-2020, tentang Pembentukan KTN sebagai *Pilot Project* seluruh Polda untuk ikut mengimplementasikan di wilayah masing-masing hingga kemudian menjadikannya sebagai program unggulan nasional.

Saat ini berdasarkan data Anev Kampung Tangguh Nusantara dari Mabes Polri hingga tanggal 28 Maret 2021, di seluruh Indonesia tercatat sudah berdiri 24.026 Kampung Tangguh Nusantara yang berhasil didirikan Polri bersama para pemangku kepentingan lainnya. Polda Jawa Tengah menjadi Polda yang paling banyak mengimplementasikan program KTN. Tercatat tidak kurang terdapat 8.877 Kampung Tangguh Nusantara berhasil dibentuk.³¹ Keberhasilan Polri dalam menyiapkan puluhan ribu Kampung Tangguh Nusantara tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Polri, Satgas Covid-19 di daerah, TNI, Pemda dan unsur perangkat desa dan dukungan masyarakat sendiri.

Program Kampung Tangguh Nusantara yang memberdayakan kemandirian masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19 pada akhirnya menjadi selaras dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. PPKM merupakan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat yang kini

³¹ Data Anev Kampung Tangguh Nusantara, Mabes Polri.

dilakukan menggunakan pendekatan penyekatan dalam lingkungan yang kecil sehingga pengaruh terhadap perekonomian masyarakat relatif kecil.

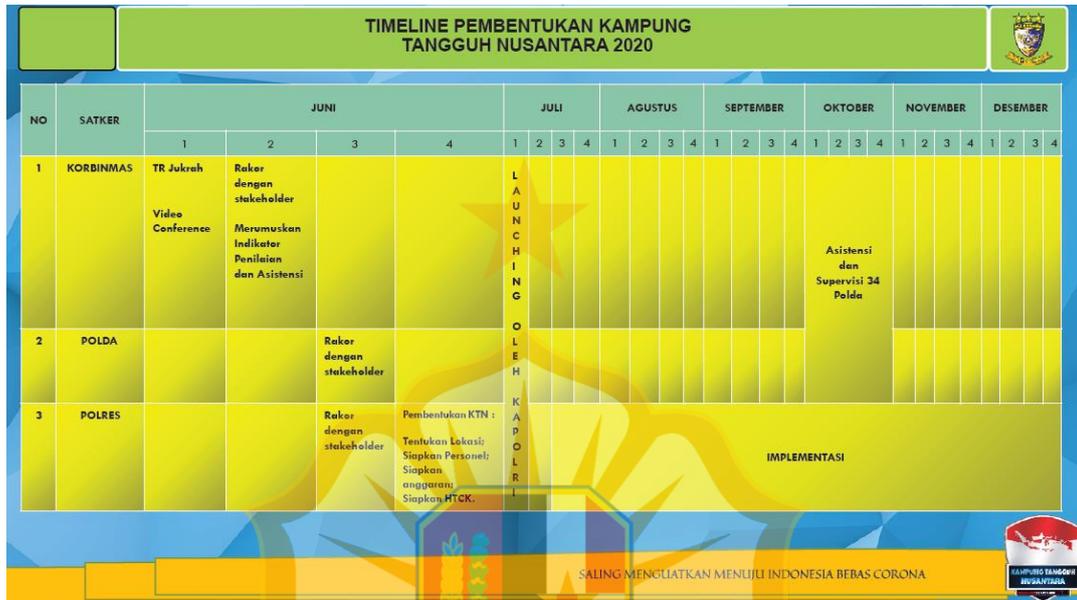
Namun demikian, implementasi KTN masih memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan tersebut ditemukan baik mulai dari tataran perencanaan dan persiapan, tataran pengorganisasi dan pengalokasian sumber daya, hingga pada proses pelaksanaan. Dalam Bab ini akan dianalisa sejumlah kelemahan yang ditemukan dalam program Kampung Tangguh Nusantara menggunakan sejumlah landasan teori, guna merumuskan sejumlah strategi dan upaya perbaikan sehingga dapat menjadi masukan dan sumbangsih pemikiran bagi pengelolaan KTN yang lebih baik dan efektif di masa yang akan datang.

13. Program Potensial dengan Perencanaan yang Lebih Matang

Situasi pandemi Covid-19 yang semakin meluas dan mengancam keselamatan masyarakat Indonesia membuat Polri tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan perencanaan yang matang dalam membangun Kampung Tangguh Nusantara yang akan digelar serentak di seluruh penjuru nusantara. Proses perencanaan dan persiapannya sendiri terbilang singkat karena hanya diberikan waktu kurang dari satu bulan.

Berawal dari Perintah Kapolri kepada seluruh Kapolda dan jajarannya untuk membangun dan mengembangkan Kampung Tangguh Nusantara di wilayahnya. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1635/VI/OPS.1.1.1./2020 pada tanggal 9 Juni 2020. Dalam petunjuk dan arahannya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membentuk KTN terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari Tahap Persiapan di mana akan dilakukan fungsi koordinasi dengan stakeholder lain termasuk dalam menentukan titik lokasi implementasi KTN. Kedua, Tahap Perencanaan dan Pengorganisasian, di mana di dalamnya terdiri dari pembentukan dan pelatihan Tim POP dan pembentukan dan peningkatan kapasitas pengurus KTN. Ketiga, Tahap Pelaksanaan, di mana di dalamnya terdiri dari pendataan warga dan tes kesehatan awal. Keempat, Tahap respons atau Aksi, yang terbagi dalam sejumlah bidang aksi, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, keamanan, analisa dan evaluasi (Anev) berkala. Program Kampung

Tanggung Nusantara ini adalah program wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh Polda dan jajarannya. Kapolri menargetkan bahwa di setiap daerah, *pilot project* KTN sudah siap dan bisa diresmikan pada minggu pertama bulan Juli 2020.

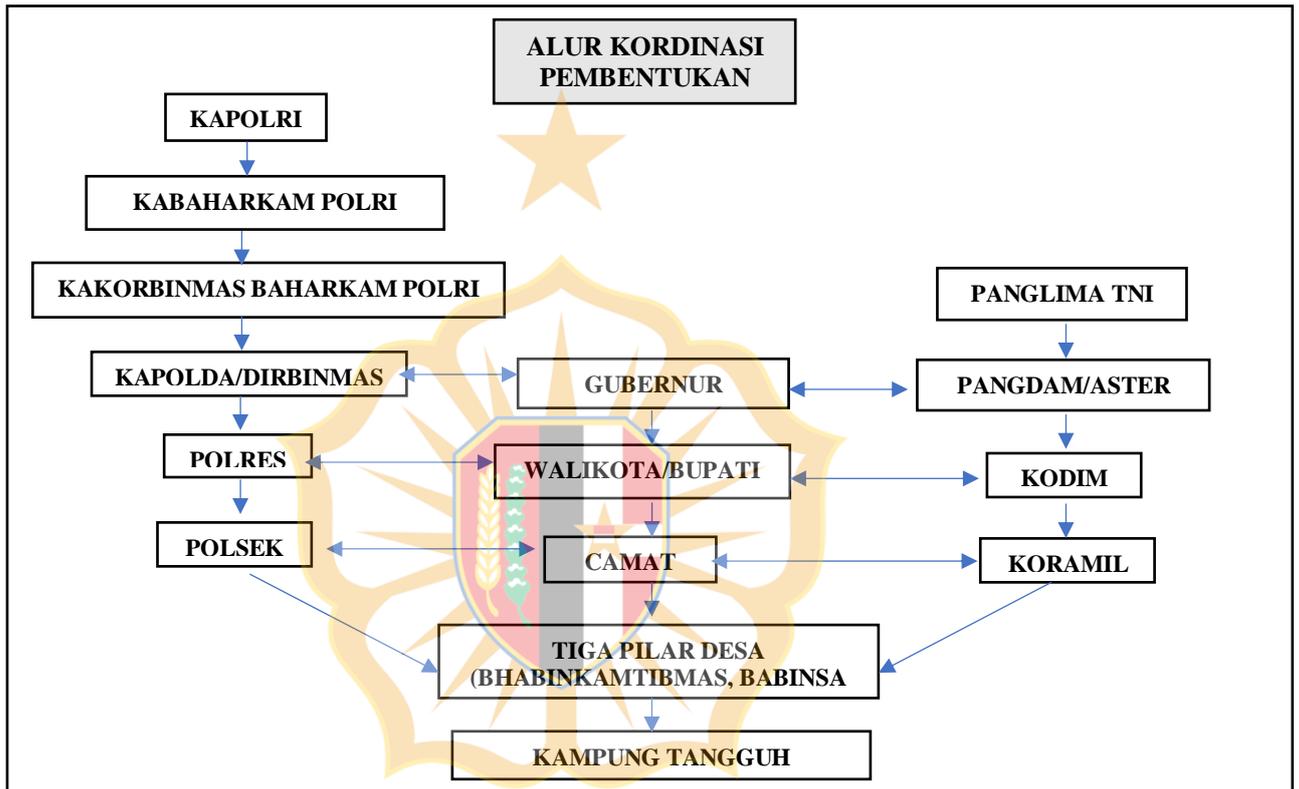


Sumber: Paparan Kapolri tentang KTN

GAMBAR 3.1 Timeline Pembentukan Kampung Tangguh Nusantara 2020

Perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kabaharkam Polri yang saat itu dijabat oleh Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, SH, MH kepada Kakorbinmas Baharkam Polri Irijen Pol Drs. Risyapudin Nursin, Sik untuk membuat petunjuk dan arahan (jukrah) yang lebih mendetail mengenai program Kampung Tangguh Nusantara guna menjadi pembekalan bagi para Direktur Binmas yang ada di setiap Polda yang dilakukan melalui *Video Conference*. Berbekal Jukrah tersebut, Direktur Binmas Polda melakukan jukrah kepada Kapolres dan Kasat Binmas yang ada di setiap Polres yang ada di wilayahnya. Direktur Binmas Polda juga melaksanakan koordinasi dalam bentuk rakor atau Forum Group Discussion (FGD) dengan Pangdam, Gubernur dan Satgas Covid-19 di tingkat provinsi guna menyosialisasikan rencana Polri untuk membentuk KTN di desa-desa di wilayahnya.

Pada tingkat Polres, Kapolres bersama Kasatbinmas Polres akan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Dandim, Satgas Covid19 Kabupaten/Kota, Para Camat dan Kepala Desa. Koordinasi dilakukan tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi kegiatan KTN, namun sudah dalam tahapan membangun kolaborasi dan sinergi kekuatan agar program KTN dapat terealisasi.



GAMBAR 3.2 Alur Koordinasi Pembentukan Kampung Tangguh Nusantara

Seperti diketahui, KTN dibangun sebagai program kolaborasi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas/Satgas Covid19. Sejak awal Polri tidak memiliki anggaran khusus yang diperuntukan bagi pembentukan KTN. Oleh sebab itu, penganggaran mengedepankan swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah daerah setempat.

Pada awal mewabahnya pandemi ada sejumlah kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi KTN yaitu lokasi dimana sebaiknya berada pada episentrum penyebaran Covid-19; lokasi yang dipilih bisa lebih dari satu; lokasi tersebut memiliki masyarakat dengan kategori beresiko tinggi; lokasi sebaiknya berdasarkan data dan hendaknya merujuk

pada tingkat kedisiplinan warga yang paling rendah. Selain itu, penentuan lokasi tidak hanya terbatas berdasarkan pendekatan pada sisi kesehatan semata, namun bisa juga berdasarkan pertimbangan tingginya dampak penyerta dari kondisi pandemi, misalnya terkait sosial ekonomi masyarakat atau masalah-masalah lain yang rentan muncul selama masa pandemi Covid-19. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam berdisiplin mengikuti protokol kesehatan juga menjadi bahan pertimbangan.

Saat prioritas lokasi KTN dapat diputuskan, maka langkah selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan dan anggaran dalam rangka pembentukan KTN. Sebagai suatu program yang diajukan maka program ini disusun dengan anggaran seminim mungkin dan lebih banyak memanfaatkan sumber daya yang ada di lokasi KTN. Sumber pendanaan akan lebih banyak diupayakan melalui swadaya masyarakat dan bantuan dari pemerintah daerah setempat.

Langkah berikutnya adalah mempersiapkan Tim *Problems oriented Policing* (POP) yang akan bertugas membina, menyiapkan dan mendampingi masyarakat dalam membentuk KTN di lingkungannya. Mereka adalah para Bhabinkamtibmas yang selama ini bertugas di desa-desa. Sebagai bagian dari Tim POP Polri yang harus sigap dan terampil mengambil keputusan secara cepat dan sigap melakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terkait pada saat muncul persoalan, maka personil-personil ini diberikan pembekalan dan pelatihan oleh Direktorat Binmas Polda agar mampu menjalankan tugas dengan metode *scanning, analysing, response dan assessment*. Tujuan utama tim POP Polres adalah menekan laju penyebaran covid-19 serta mengatasi dampak yang ditimbulkan. Dalam pelatihan tersebut Tim POP akan mendapatkan pembekalan sejumlah kemampuan dalam membina kemandirian dan ketangguhan masyarakat agar mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama masa pandemi secara mandiri.

Hal itu merupakan gambaran proses persiapan dan perencanaan Kampung Tangguh Nusantara. Program unggulan Polri dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 ini masih memiliki sejumlah kendala dan kelemahan. Waktu yang terbatas dalam

merencanakan implementasi KTN karena harus berkejaran dengan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat yang terus meningkat tentu akan mempengaruhi kualitas program KTN itu sendiri. Tidak dianggarkannya secara khusus pembentukan KTN juga menjadi tantangan mengenai bagaimana program KTN dapat diimplementasikan hingga mencapai satu standar mutu/kualitas tertentu. Kondisi demikian pada akhirnya membuat pembentukan KTN tidak bisa dilaksanakan serentak, namun bergantian berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tingkat dan situasi yang dihadapi masyarakat.

Oleh sebab itu, guna mewujudkan program Kampung Tangguh Nusantara yang lebih optimal di kemudian hari, tidak ada yang lebih penting dibandingkan bahwa Polri harus memperbaiki dan mempersiapkan perencanaan KTN agar dapat lebih matang. Tujuannya jelas, agar program ini mampu diimplementasikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam teori Manajemen menurut Stoner, perencanaan merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses mencapai tujuan. Perencanaan merupakan proses penentuan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Tanpa perencanaan yang matang, maka tahapan manajemen selanjutnya, seperti tahapan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tidak akan berjalan baik.

Berkaitan dengan sejumlah kelemahan dan kendala yang ditemukan maka sejumlah strategi yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan tahap perencanaan dapat dimulai dengan mematangkan konsep Kampung Tangguh Nusantara yang akan digunakan sebagai pedoman Polri dalam mengimplementasikan di lapangan. Korbinmas Baharkam Polri dapat memperkuat konsep Kampung Tangguh Nusantara dengan mempelajari studi kasus implementasi Kampung Tangguh Semeru yang sudah berjalan. Berbagai keunggulan dan keberhasilan dapat dijadikan rujukan, sementara sejumlah kendala dan kelemahan yang dihadapi harus dicarikan solusi. Studi kasus secara menyeluruh menjadi satu yang wajib dilakukan guna menginventarisasi hal-hal yang sudah berjalan baik dan dapat diadopsi dan

sejumlah kekurangan yang akan menjadi bahan pembelajaran dan masukan. Selanjutnya, Korbinmas Baharkam Polri membuat satu buku pedoman mengenai bagaimana membangun Kampung Tangguh Nusantara yang bisa dipedomani dan dimengerti bukan hanya oleh Tim POP Polres tapi juga bisa jadi pedoman bagi *stakeholder* lain yang terlibat di dalamnya. Hal ini akan memudahkan kesamaan visi, pola pikir dan pola tindak yang harus dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan.

Selanjutnya, sebagai inisiator KTN, sudah selayaknya jika Polri memiliki anggaran khusus yang digunakan dalam membangun KTN. Sekalipun anggaran yang diberikan tidak sepenuhnya mampu membiayai KTN secara utuh, namun setidaknya mampu menjadi modal awal dalam membentuk KTN. Harapannya, saat Polri sudah didukung dengan anggaran, maka pembentukan KTN bisa langsung dan lebih cepat diimplementasikan sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah maupun dari swadaya masyarakat. Sekali lagi, kecepatan implementasi KTN akan sangat bermanfaat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang muncul akibat masifnya penyebaran Covid-19. Polri juga diharapkan mampu mendorong dan menginisiasi pemerintah daerah untuk memasukan KTN dalam anggaran APBD mengingat program Kampung Tangguh Nusantara ini semestinya dapat diimplementasikan ke seluruh desa di Indonesia.

Upaya membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat tidak bisa hanya menjadi sebuah "reaksi" dari adanya episentrum penyebaran Covid-19 di satu wilayah. Kesiapan dan ketangguhan masyarakat tersebut idealnya sudah dibangun dan disiapkan sekalipun wilayah tersebut belum terdampak Covid-19. Hal ini penting mengingat hingga kini tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Kehadiran vaksin Covid-19 pun juga terbukti tidak serta merta membuat ancaman Covid-19 mereda. Kasus pandemi Covid-19 di India menjadi satu peristiwa bagaimana negara penghasil vaksin pada akhirnya gagal mengatasi dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di negaranya akibat kesadaran masyarakat yang rendah disiplinnya terhadap protokol kesehatan.

Berkaitan dengan kemampuan untuk membangun koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah *stakeholder* maka Tim POP Polri perlu mendapatkan pembekalan terlebih dahulu dan mengerti betul konsep KTN yang akan ditawarkan. Korbinmas Baharkam Polri disarankan juga sudah menyiapkan dokumentasi berupa video yang berisi paparan kesuksesan implementasi KTN di sejumlah wilayah di Indonesia, dan bagaimana keberadaan KTN dapat ikut berperan dalam mengendalikan tingkat penyebaran Covid-19 serta bagaimana KTN dipandang sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam memంచి Covid-19. Hal ini akan membantu anggota dalam meyakinkan sejumlah *stakeholder* untuk memberikan dukungan dan kerja samanya dalam membangun KTN.

Kemampuan Tim POP untuk meyakinkan semua pihak untuk mendukung implementasi KTN sangat penting, sekalipun di wilayah tersebut mungkin paparan Covid-19 sedang tidak mengalami peningkatan. Hal ini karena KTN dibangun bukan hanya untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang sedang mewabah pesat di satu wilayah, tapi juga berguna untuk mengatasi berbagai persoalan lainnya, mulai dari rendahnya kedisiplinan warga untuk mentaati protokol kesehatan, banyaknya masyarakat beresiko tinggi di daerah tersebut, banyaknya masyarakat yang menolak vaksinasi hingga banyaknya warga yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi. Oleh sebab itu, implementasi KTN perlu adanya pergeseran dari yang awalnya wajib diimplementasikan di wilayah yang tengah menjadi episentrum penyebaran Covid-19, menjadi wilayah-wilayah yang mengalami dampak besar, bukan hanya secara kesehatan tapi juga sosial ekonomi.

14. Pengorganisasian Kampung Tangguh Nusantara

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian KTN. Dalam teori manajemen, pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang dan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya,

mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.³² Menurut George R. Terry (2006),³³ organizing mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi

Pada tahap ini mulai dibentuk kepengurusan KTN yang merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi sasaran program. Tahap ini diawali dengan menginventarisasi warga-warga yang memiliki potensi dan kompetensi secara manajerial, dan melakukan *scanning* terhadap kompetensi warga yang ada untuk mengisi struktur organisasi. Kepengurusan KTN intinya terdiri dari Pembina sebanyak tiga orang, yang salah satunya Kepala Desa. Kemudian satu orang ketua, sekretariat dan satgas kesehatan, sosial ekonomi dan keamanan. Jumlah satgas ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan KTN, misal satgas informasi dan penyuluhan, transportasi, dan lain sebagainya.

Pengurus KTN diutamakan adalah warga yang memiliki posisi penting dalam komunitas di wilayah tersebut baik RT, RW hingga Desa. Para pengurus KTN merupakan warga yang memiliki kepedulian terhadap penanganan penyelesaian Covid-19. Guna memastikan kepengurusan dapat bergerak secara optimal, maka pengurus KTN diutamakan warga yang sudah menjalankan *scanning* kesehatan dan sudah dinyatakan hasilnya negatif terhadap paparan Covid-19. Pemilihan pengurus KTN juga hendaknya menghindari aspek pengaruh politik praktis dan kepentingan lainnya.

Berikut ini merupakan penjabaran struktur organisasi kepengurusan KTN beserta tugas pokok dan spesifikasi khusus dari kriteria warga yang dibutuhkan.

a. Penasehat/Pembina

³² Fattah, Nanang. 2008. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

³³ Terry, George R. 2006. Guide to Management, terj. J. Smith. D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara

Terdiri dari tiga orang yang diambil dari Ketua Desa, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat setempat.

Jabatan ini memiliki tugas pokok, antara lain:

- 1) Menjadi penghubung dengan struktur pemerintah di atasnya
- 2) Menjadi penggerak struktur pemerintahan desa.
- 3) Menjadi pengadil pada saat terjadi konflik sosial.

b. Ketua

Sosok warga yang cocok dipilih menjadi Ketua KTN adalah seseorang yang berani mengambil keputusan pada saat kritis dengan cepat termasuk melakukan peneguran yang humanis kepada warga yang tidak mengikuti peraturan dan prosedur. Orang tersebut bukan tipe orang yang mudah sungkan atau bahkan takut tidak disukai oleh warga yang tidak berdisiplin dan tidak bersedia bekerja sama dengan masyarakat lain.

Tugas pokok seorang ketua, yaitu menjadi komando seluruh struktur organisasi untuk memastikan seluruh SOP dijalankan dengan baik saat ada warga di lingkungannya yang terpapar Covid-19.

c. Sekretariat

Posisi ini dapat diisi oleh sekretaris RW atau wakil atau anak muda yang supel dan menguasai teknologi informasi, mampu melakukan pendataan terhadap warga dan menjadi petugas penghubung dengan satgas lain.

Tugas pokok yang diemban sekretariat, diantaranya:

- 1) Mengumpulkan semua data nomor tlpn warga
- 2) Membuat WA group tiap RT
- 3) Mendata warga srabutan
- 4) Menghitung kebutuhan pangan pekerja srabutan
- 5) Mendata tempat penjual sembako serta jumlah sembakonya
- 6) Mendata jumlah anak muda produktif
- 7) Mendata warga yang rentan sakit dan orang tua

d. Satgas Keamanan dan ketertiban.

Posisi ini hendaknya diisi oleh Linmas, Banser, Kokam atau unsur bela negara lainnya. Mereka yang nantinya akan melakukan patroli berkala setiap tiga jam sekali di lingkungan dan memastikan setiap orang maupun barang yang masuk sesuai dengan SOP kesehatan.

Tugas utama dari satgas ini adalah:

- 1) Menjaga keamanan lingkungan
- 2) Memastikan ketertiban selama proses karantina
- 3) Mengatur keluar masuk orang dan barang.

e. Satgas Kesehatan

Kepengurusan ini idealnya dipegang oleh tim kesehatan desa yang diasistensi oleh bidan desa atau tenaga kesehatan yang tinggal di wilayah bersangkutan.

Tugas pokok dari Satgas kesehatan, diantaranya:

- 1) Mengecek kesehatan warga minimal suhu dan kondisi fisik sesuai dengan rekomendasi Tim Kesehatan Satgas Covid-19.
- 2) Menangani warga yang sakit non-Covid selama proses karantina.
- 3) Membantu Tim Kesehatan untuk melakukan evakuasi jika ada Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19 yang memerlukan tindakan untuk dievakuasi ke rumah sakit.

f. Satgas Sosial Ekonomi

Kepengurusan ini dapat dipegang oleh warga desa yang kesehariannya memiliki usaha (wiraswasta), atau warga desa yang tengah berstatus mahasiswa dan memiliki ide-ide guna mengembangkan ekonomi kreatif di wilayahnya.

Tugas pokok dari Satgas ini, yaitu:

- 1) Melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi, yang bisa diakibatkan karena kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencarian.

- 2) Menghitung dan menyiapkan kebutuhan logistik sembako yang dibutuhkan warga terdampak hingga mereka mampu kembali mandiri,
- 3) Membangun ketahanan pangan sekaligus menjadi tempat mendapatkan penghasilan tambahan warga terdampak. (bercocok tanam sayuran di lahan tidur, memelihara unggas dan ikan)
- 4) Mendata potensi ekonomi kreatif yang dimiliki desa yang bisa dikembangkan guna menopang ekonomi masyarakat terdampak khususnya selama masa pandemi.

g. Satgas Informasi dan Penyuluhan

Kepengurusan ini merupakan warga yang memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik, mampu dan mudah mempengaruhi warga untuk menaati protokol kesehatan. Warga tersebut juga memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi guna menunjang tugas-tugasnya, misal membuat WA group, mengelola akun media sosial KTN, mampu menggunakan radio panggil (HT). Semua konsentrasi informasi warga tersebut terfokus di Posko KTN yang lokasinya sesuai dengan keputusan warga.

Tugas pokok dari satgas ini, diantaranya:

- 1) Membuat Publikasi berkala terkait informasi Covid-19 dan perkembangan yang ada di lingkungan kampung
- 2) Mengumpulkan semua nomor telepon penting (Ambulance, Dokter, hotline Covid-19 dan memastikan semua warga juga memilikinya)
- 3) Memonitor Kondisi warga melalui group WA
- 4) Mencegah informasi Hoax atau timbulnya stigma sosial
- 5) Memberikan penyuluhan secara terus menerus kepada warga pentingnya menjalankan protokol kesehatan serta selalu mengembangkan pola hidup bersih dan sehat.

Setelah kepengurusan KTN terbentuk, selanjutnya para pengurus akan mendapatkan pembekalan dan peningkatan kapasitas agar mampu menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Pembekalan tersebut akan dilakukan oleh Tim POP Polres baik dalam bentuk seminar *online* maupun pembekalan secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sejumlah materi pembekalan yang diberikan diantaranya:

- a. Pembekalan terkait tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengurus KTN
- b. Kemampuan dan ketrampilan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) ketika menghadapi warga yang diduga terinfeksi Covid-19.
- c. Kemampuan dan ketrampilan *psychological first aid* (PFA) atau pertolongan pertama gangguan psikologi warga yang terdampak Covid-19.
- d. Kemampuan dan ketrampilan di bidang pengelolaan keamanan wilayah KTN.
- e. Kemampuan dan ketrampilan tentang pengelolaan bantuan sosial-ekonomi.
- f. Kemampuan dan Ketrampilan dasar dalam mengelola administrasi KTN
- g. Kemampuan dan ketrampilan menyelesaikan masalah sosial, masalah pelanggaran dan masalah kejahatan ringan.

Dalam praktek di lapangan terkait tahapan pengorganisasian KTN ini umumnya tidak mengalami kendala apapun. Masyarakat di berbagai wilayah cukup antusias untuk diajak bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan kemandirian dan ketangguhan wilayahnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini karena gagasan pembentukan KTN tidak bersifat *top down*, namun juga melibatkan dan menyerap setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam implementasinya konsep KTN bersifat dinamis dan tidak kaku karena menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lingkungannya.

Dapat diartikan bahwa konsep pembentukan KTN memang selaras dengan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005) mengandung lima prinsip utama, yaitu:³⁴

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi: di mana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan

Bila merujuk pada lima prinsip pemberdayaan masyarakat di atas sebenarnya prinsip partisipasi, keberlanjutan dan keterpaduan sudah sesuai dengan keberadaan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. Demikian pula dengan pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sudah sejalan dengan Konsep Kampung Tangguh Nusantara dimana adanya keterpaduan antara lintas sektoral, bersinergi untuk mewujudkan kemandirian dan ketangguhan wilayahnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

³⁴ Sutrisno, D. 2005. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Selain itu, jauh sebelum pembentukan KTN yang kini telah disebarluaskan oleh Polri melalui seluruh Polda, BNPB sebenarnya juga sudah memiliki konsep Kampung Tangguh Bencana. Kampung Tangguh Bencana ini diatur oleh Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Semestinya sejak BNPB dan Polri bisa menyatukan keduanya dalam KTN, dalam artian ketangguhan menghadapi bencana alam semestinya juga dapat termasuk dalam salah satu program KTN. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya keberadaan KTN juga memiliki keterpaduan dengan konsep Kampung Tangguh bencana milik BNPB sehingga keduanya dapat dijalankan bersamaan.

Pemikiran tersebut menjadi sangat layak diwujudkan mengingat Indonesia secara geografis terletak di wilayah yang memiliki kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sekalipun bangsa ini sedang dilanda pandemi Covid-19, namun bukan berarti keberadaan pandemi membuat ancaman bencana alam akan hilang atau menunggu giliran untuk kembali menerpa Indonesia. Sebaliknya, ancaman bencana ganda yang disebabkan terjadinya bencana alam di masa pandemi adalah satu keniscayaan yang harus disikapi dan diantisipasi sejak dini.

Bencana ganda sebenarnya sudah terjadi berulang kali sejak pandemi Covid-19 menyapa Indonesia. Sebut saja bencana banjir besar di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara pada 17 Juni 2020, banjir lumpur di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020, gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, hingga banjir bandang yang hampir menenggelamkan satu provinsi di Kalimantan Selatan pada 14 Januari 2021 lalu.³⁵ Menurut perhitungan BNPB, ada sedikit 2.925 bencana yang terjadi selama kurun waktu tahun 2020 lalu.³⁶ Hal ini menunjukkan sebenarnya membangun ketahanan bencana selama masa pandemi adalah satu hal

³⁵ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/bencana-alam-di-tengah-pandemi-covid-19> diunduh pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

³⁶ <https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi> diunduh pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

yang penting dilakukan sebagai konsekuensi letak geografis wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tahapan pengorganisasian sebenarnya ada sejumlah hal yang menjadi kekurangan dan dapat lebih dioptimalkan. Hal ini agar upaya untuk mengatasi berbagai persoalan dimasa pandemi dapat dikolaborasikan dan dipadukan menjadi satu langkah bersama, dan bukan lagi menjadi program-program yang terpisah-pisah antara satu lembaga dengan lembaga lain. Harapannya dengan semakin banyak pihak yang ikut terlibat, ikut berkontribusi dan mengambil peran, maka kekuatan dan manfaat yang didapat oleh masyarakat pun semakin besar.

Keberadaan Instruksi Mendagri menjadi lebih berdampak besar jika kemudian diberikan dalam bentuk kolaborasi dukungan dan keterlibatan Kemendagri dalam program KTN. Kemendagri dapat memberikan instruksi kepada Pemda guna meningkatkan dukungan, khususnya berkaitan dengan anggaran yang bisa digunakan untuk membangun lebih banyak KTN di lebih banyak desa di Indonesia. Kemendagri juga dapat berperan untuk menginstruksikan pemerintah daerah membuat peraturan daerah terkait program Kampung Tangguh Nusantara sehingga keberadaan program ini dapat berkesinambungan dan memberikan faedah bagi masyarakat untuk membangun ketangguhan-ketangguhan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa sudah sangat tepat dengan keberadaan Kampung Tangguh Nusantara sebagai struktur lembaga desa. Karena terbentuknya KTN sebagai wujud kembali ke jati diri Bangsa Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika yaitu semangat gotong royong dan saling tolong menolong dalam menghadapi percepatan penanganan pandemi ini.

Berkaitan dengan membangun ketangguhan terhadap bencana, maka konsep KTN sebaiknya diperluas dengan melibatkan dan mengikutsertakan BNPB. Peran BNPB dirasa penting untuk ikut memberdayakan KTN agar masyarakat juga memiliki ketangguhan terhadap bencana alam. Harapannya, masyarakat akan lebih siap sewaktu waktu harus menghadapi

bencana ganda. Langkah tersebut dapat diwujudkan dengan menambahkan Satgas Bencana Alam dalam struktur kepengurusan KTN.

Pada kepengurusan Satgas Bencana Alam ini akan memprioritaskan warga yang selama ini sudah banyak terlibat dalam organisasi relawan bencana, pecinta alam, atau pihak-pihak yang kerap terlibat dalam aktivitas SAR. Satgas ini semestinya tidak hanya terdiri dari satu orang pengurus tapi melibatkan beberapa warga mengingat kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Sejumlah tugas pokok Satgas bencana alam, di antaranya:

- a. Bersama BNPB membuat pemetaan jenis bencana alam yang mengancam wilayah tersebut
- b. Bersama BNPB dan pihak terkait menyusun upaya membangun sistem peringatan dini.
- c. Memetakan dan menentukan lokasi yang aman digunakan sebagai titik kumpul dan titik pengungsian.
- d. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan kebencanaan, mulai dari peka terhadap tanda-tanda alam, cara melindungi diri ketika bencana terjadi dan bagaimana prosedur dan tempat aman untuk melakukan evakuasi
- e. Membantu masyarakat melakukan evakuasi dan pertolongan pertama jika terdapat korban luka.
- f. Membantu masyarakat menyiapkan tempat pengungsian darurat sebelum bantuan dari pihak lain berdatangan.
- g. Mengkoordinasikan kekuatan masyarakat untuk mengamankan logistik untuk mendukung kebutuhan hidup masyarakat saat berada di pengungsian.
- h. Berkoordinasi dengan BNPB dan pemda untuk memberikan informasi mengenai posisi dan jumlah pengungsi, serta berbagai logistik yang dibutuhkan pengungsi.
- i. Bekerja sama dengan Satgas Kesehatan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi selama masyarakat berada di pengungsian.

Kehadiran Satgas Bencana Alam hasil kolaborasi BNPB dalam program KTN diharapkan mampu membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana ganda yang bisa sewaktu-waktu terjadi selama masa pandemi masih berlangsung.

Saat seluruh persiapan hingga pembekalan terhadap pengurus KTN selesai dilakukan, maka tahapan Pengorganisasian diakhiri dengan program sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi target KTN. Tujuannya agar muncul peran aktif masyarakat untuk membangun ketangguhan menghadapi beragam persoalan selama pandemi. Program KTN menitikberatkan pada peran aktif seluruh masyarakat dalam bergotong royong memecahkan masalah yang dihadapinya. Keberadaan pengurus KTN bukan sebagai pelayan masyarakat untuk mendapatkan pelayananan KTN, namun sebagai koordinator guna membangun keterlibatan semua pihak dalam program KTN. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Tim POP bersama pengurus KTN dengan memperhatikan sejumlah hal berikut ini:

- a. Menghindari penggunaan pendekatan transaksional untuk mendapatkan dukungan warga namun kedepankan kesadaran kolektif;
- b. Kesadaran kolektif dapat ditimbulkan dengan memberikan sejumlah informasi laju penyebaran covid-19 di kampungnya dan potensi kerawanan yang dapat terjadi apabila diabaikan;
- c. Mengedepankan bahasa yang mudah dipahami oleh warga setingkat RT/RW/Dusun sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat;
- d. Menggunakan media teknologi informasi yang menarik masyarakat;
- e. Dapat menggunakan metode *psychological first aid* (PFA) sebagai metode pendekatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam KTN;
- f. Memastikan bahwa sebagian besar warga yang mendapatkan sosialisasi mendukung program KTN.

15. Pelaksanaan dan Pengawasan Kampung Tangguh Nusantara

Selesai dengan tahap pengorganisasian, pembangunan KTN selanjutnya memasuki tahap pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap pelaksanaan, Polri akan mulai masuk dengan pendekatan *Problems Oriented Policing* (POP). Pendekatan ini menggunakan metode *scanning, analysing, response* dan *asessment*.

Hal pertama yang dilakukan adalah pendataan warga dan melakukan tes kesehatan awal sebagai bagian dari *scanning* persoalan. Pendataan warga tersebut dilakukan dengan menggunakan format kuisener dari Biddokes Polda. Pelaksananya adalah Tim POP yang didampingi oleh pengurus KTN. Waktu pendataan warga maksimal berlangsung selama tiga hari, meliputi pendataan di bidang kesehatan, sosial ekonomi, keamanan, dan sumber daya. Selanjutnya program tersebut dilanjutkan dengan melakukan tes kesehatan awal kepada masyarakat. Hasil tes awal dan pendataan kesehatan ini akan menjadi dasar untuk menentukan dan memetakan kelompok warga berdasarkan kelompok sehat, kelompok beresiko dan kelompok bergejala klinis berat.

Berdasarkan pendataan dan hasil tes kesehatan awal, kemudian dilakukan kajian dan analisa yang melibatkan unsur-unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Gugus Tugas Kota/Kabupaten, Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka), tiga pilar desa dan *stakeholder* terkait lainnya. Hasil dari kegiatan analisa ini sebagai dasar untuk memetakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan langkah-langkah perbaikan yang akan dijalankan.

Dalam forum ini juga dibahas mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan dalam membangun KTN dan dari mana saja sumber anggaran pembiayaannya. Sebagai program yang mengedepankan kolaborasi dan peran aktif semua pihak, memang sejak awal Polri tidak memiliki anggaran guna merealisasikan seluruh konsep KTN. Umumnya konsep ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Pemerintah Desa dan donatur dari masyarakat yang memiliki kondisi finansial kuat. Sekalipun dibiayai secara patungan, program KTN yang berhasil dibangun hingga akhir April 2021 mencapai 24.026 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal

ini menandakan bahwa rasa kegotong-royongan di tengah masyarakat sebenarnya masih sangat tinggi dan terbukti dapat menjadi modal kuat guna memperkuat ketangguhan masyarakat itu sendiri.

Inilah merupakan wujud dari apa yang disebut oleh Deardorf dan Williams (2006), sebagai sinergitas. Sebuah proses interaksi dari sejumlah pihak akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual.³⁷ Konsep sinergitas muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis.³⁸

Tahapan di atas kemudian akan dilanjutkan dengan tahap respon yang berisi sejumlah aksi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk bekerjasama membangun ketangguhan di sejumlah bidang. Dimulai dari bidang kesehatan yang merupakan berbagai upaya mandiri masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan dalam penanggulangan Covid-19 di wilayahnya. Sejumlah kegiatan yang dilakukan, yaitu:

- a. Pembentukan posko kesehatan yang akan menjadi pusat penanggulangan dampak kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Posko ini ada yang dibangun di dekat akses jalan masuk Desa, meminjam rumah warga, hingga tidak sedikit yang menumpang di balai Desa atau balai RW yang ada di lingkungan tersebut.
- b. Penerapan pola budaya hidup sehat (PBHS). Dalam tahapan ini masyarakat diberikan edukasi pentingnya membudayakan pola hidup bersih dan sehat, serta berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Selain saling membantu menyiapkan peralatan menjaga kebersihan seperti tempat mencuci tangan di setiap depan rumah warga, membagikan masker dan *hand sanitiser*, juga masyarakat

³⁷ Deardorff, D.S., & Williams, G. 2006. Synergy Leadership in Quantum Organizations. California: Fesserdorff Consultants.

³⁸ Firmansyah, MI. 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara BPJS Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga Surabaya, Volume 4, Nomor 2, Edisi Mei-Agustus 2016, Halaman 146-156

dibudayakan menjaga tetangga sekitar, dengan menegur mereka jika mengabaikan protokol kesehatan.

- c. Selama di wilayah KTN termasuk zona merah atau zona orange paparan Covid-19, maka dilakukan penerapan SOP keluar masuk wilayah KTN. Sejumlah kader KTN akan bertugas bergiliran menjaga akses keluar masuk wilayah KTN agar baik warga yang keluar dan khususnya jika ada yang masuk, senantiasa menjalankan protokol kesehatan yang ketat serta mendapatkan pemeriksaan suhu tubuh.
- d. Penerapan SOP keluar masuk rumah/tempat tertentu di wilayah KTN. Pembatasan ini dilakukan terhadap rumah warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Keberadaan tamu atau anggota keluarga yang ingin menjenguk ke rumah tersebut akan dilarang. Demikian pula jika penghuni rumah yang sedang melaksanakan isolasi mandiri berupaya untuk keluar rumah.
- e. Penerapan SOP bagi kelompok rentan. Guna menjaga agar warga yang beresiko tinggi tidak terpapar oleh Covid-19 maka akan dijauhkan dan diamankan untuk berkontak dengan warga yang setiap hari harus keluar masuk wilayah KTN karena harus bekerja.
- f. Penerapan SOP pemulasaran jenazah dan penerapan SOP pemakaman jenazah. Sejumlah warga akan diberikan edukasi dan pembekalan mengenai tahap-tahapan bagaimana pemulasaran terhadap jenazah penderita Covid-19 termasuk tata cara pemakamannya. Dalam hal ini Tim POP juga menyiapkan APD dan sejumlah sarana yang dibutuhkan dalam pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 dengan menunjuk tim relawan pemakaman jenazah Covid-19.
- g. Penerapan metode *psychological first aid* (PFA) dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 oleh seluruh warga. Hal ini penting karena pada sejumlah kasus penderita Covid-19 kerap mengalami tekanan bathin karena harus mengasingkan diri dari semua orang selama masa isolasi mandiri. Bayang-bayang ketakutan bahwa saat mereka meninggal tidak bisa dijenguk dan diantarkan oleh keluarga yang dicintai juga kerap membuat kondisi penderita Covid-19 memburuk

akibat stres berlebihan. Oleh sebab itu PFA menjadi satu upaya untuk menjaga optimisme warga yang sedang menjalankan pengobatan dan atau isolasi mandiri.

- h. Penerapan SOP permintaan bantuan kesehatan dan psikologi bagi warga yang membutuhkan pendampingan khusus;

Upaya intervensi dan pembinaan juga dilakukan di bidang sosial ekonomi, khususnya guna memberikan bantuan kepada sejumlah warga yang terdampak secara ekonomi selama masa pandemi berlangsung. Sejumlah kegiatan yang dilakukan di bidang sosial ekonomi diantaranya:

- a. Penerapan SOP unit usaha/tata niaga di wilayah KTN.
- b. Penerapan SOP interaksi sosial di wilayah KTN
- c. Kesiapan membangun dapur umum;
- d. Pembangunan potensi UMKM lokal;
- e. Pelatihan *soft skill* untuk meningkatkan kemampuan perekonomian keluarga;
- f. Penerapan SOP permintaan bantuan sosial-ekonomis bagi warga yang membutuhkan pendampingan khusus;
- g. Identifikasi dan pemanfaatan potensi desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat terdampak
- h. dan SOP lainnya.

16. **Kampung Tangguh Nusantara Penguat Stabilitas Keamanan Wilayah**

Bidang selanjutnya yang harus dipersiapkan dan dibangun ketangguhannya adalah keamanan dan ketertiban sosial. Polri dibantu dengan TNI adalah sebagai penanggung jawab keamanan wilayah dari pandemi ini. Dampak pandemi yang meluas dan membuat roda perekonomian nasional nyaris berhenti, telah mengakibatkan naiknya angka pengangguran dan kemiskinan. Bila kondisi sosial masyarakat yang rentan tersebut tidak dilakukan intervensi, maka yang pasti akan terjadi adalah meningkatnya gangguan keamanan. Latar belakang inilah yang menjadikan bidang pertahanan dan keamanan juga merupakan bidang yang harus

mendapatkan perhatian. Sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan di bidang keamanan yaitu:

- a. Penerapan SOP penanganan pelanggaran dan kejahatan ringan;
- b. Mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan ringan;
- c. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan;
- d. Penerapan SOP permintaan bantuan keamanan bagi warga yang membutuhkan pendampingan khusus;

Selain ketiga bidang utama di atas, masyarakat juga dapat mengembangkan bidang ketangguhan lain yang sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan. Masyarakat bisa mengusulkan kepada Tim POP untuk membangun ketangguhan informasi dan penyuluhan misalnya guna melawan berbagai *hoax* yang banyak tersebar di media sosial atau membangun ketangguhan pendidikan guna membantu dan memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah KTN mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dan sejumlah ketangguhan lainnya.

Setelah tahapan respon atau aksi guna membantu masyarakat membangun kemandirian dan ketangguhan menghadapi sejumlah persoalan yang banyak ditemui selama masa pandemi, tahapan selanjutnya adalah *assessment* untuk melakukan analisa dan evaluasi (Anev) terhadap KTN. Hal ini menjadi komitmen Polri beserta seluruh stakeholder terkait bahwa Tim POP tidak akan meninggalkan begitu saja KTN yang sudah berhasil dibentuk, namun selalu memantau dan berupaya memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan selama proses pelaksanaan KTN.

Proses Anev oleh Tim POP akan dilakukan setiap satu bulan sekali sekaligus untuk melihat sejauh mana keberadaan KTN dapat mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di tengah masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi warga yang melakukan isolasi mandiri sehingga mereka dapat sembuh dan kembali ke tengah masyarakat. Anev juga berfungsi untuk menilai sejauh mana pencapaian ketangguhan masyarakat dapat terwujud. Dalam konsep KTN

sendiri, program ini dinyatakan berhasil dan selesai saat tidak ada warga di dalam wilayah KTN yang masih berstatus positif Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan tes kesehatan akhir terhadap masyarakat di dalam KTN.

Konsep awal KTN yang mengakhiri program KTN saat di wilayahnya sudah tidak lagi warga yang terpapar Covid-19 inilah yang perlu ditinjau ulang. Menurut penulis, sekali ketangguhan masyarakat sudah diaktivasi, maka hal tersebut semestinya dapat terus berlanjut. Hanya saja protokol dan SOP pengendalian wilayah pada saat ada warga yang terpapar dengan kondisi normal (tidak ada warga yang terpapar) mesti dirumuskan berbeda. Hal ini untuk menjaga agar perilaku taat protokol kesehatan masyarakat tidak mengendur sekalipun di wilayahnya sudah terbebas dari Covid-19. Selain itu, posko KTN juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang kini masih terus berjalan. Masih adanya kelompok masyarakat yang takut dan tidak bersedia divaksin menjadi tugas berikutnya pengurus KTN untuk membantu melakukan edukasi kepada warga. Harapannya, ketangguhan masyarakat di KTN akan selalu kuat terpelihara hingga selamanya, karena KTN bisa dikolaborasikan dengan lebih banyak pihak untuk kepentingan berbeda. Misal dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kemenkes, KTN bisa dijadikan upaya untuk membangun ketangguhan terhadap masalah stunting dan gizi buruk. Bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), KTN bisa dijadikan upaya untuk membangun ketangguhan masyarakat memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayahnya, dan masih banyak contoh lainnya.

Bagi Polri, upaya dan kerja keras Polri bersama TNI, pemda dan *stakeholder* lainnya dalam program KTN sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Upaya tersebut juga merupakan bentuk penanggulangan wabah yang

mengikutsertakan masyarakat secara aktif seperti diperintahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Bukan perkara mudah untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa dari ancaman Covid-19, namun dengan menggelorakan kembali nilai-nilai luhur Pancasila seperti tercermin dalam perilaku hidup bergotong royong, saling bahu membahu, dan bersolidaritas dengan sesama di sekitarnya, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan pandemi Covid-19 sebenarnya bisa menjadi ajang rekonsiliasi dan memperkuat kembali tali persaudaraan antar masyarakat.

Sebagai aparat negara, Polri memiliki kepentingan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan pandemi Covid-19. Apalagi jika melihat bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis multidimensi yang berpengaruh pada kondisi keamanan nasional. Terbukti bahwa berdasarkan laporan Mabes Polri, terjadi peningkatan gangguan kamtibmas pada awal masa pandemi. Pada minggu ke-18 dan ke-19 tahun 2020, terjadi peningkatan gangguan kamtibmas sebesar 7,06 persen yang didominasi oleh tindak kejahatan jalanan seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, penggelapan, hingga kasus hoaks.³⁹ Angka kriminalitas tersebut bahkan sempat naik hingga sebesar 38,45 persen pada pekan ke-23 dan ke-24 di tahun 2020, dari 4.244 kasus pada minggu ke-23, menjadi 5.876 pada minggu ke-24 atau mengalami kenaikan sebanyak 1.632 kasus.⁴⁰

Atas alasan inilah mengapa Polri merasa berkewajiban untuk ikut membangun kesiapan dan ketangguhan di tengah masyarakat. Bagi Polri KTN merupakan satu ikhtiar Polri untuk mencegah terjadinya peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Saat masyarakat dibantu menciptakan kesadaran komunal untuk mengubah perilaku hidup bersih dan sehat, berdisiplin menjalankan prokes, Polri sudah ikut berperan melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Saat Polri ikut hadir membangun ketangguhan ekonomi dan sosial masyarakat, Polri juga telah

³⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.

⁴⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12-514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.

menyiasati potensi gangguan keamanan yang dapat muncul akibat tekanan ekonomi masyarakat akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan selama masa pandemi. Saat Polri ikut aktif membangun ketangguhan informasi di tengah masyarakat, Polri juga ikut mencegah gangguan ketertiban yang disebabkan oleh berita palsu dan hoax yang sering diterima masyarakat melalui media sosial.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif menjaga stabilitas keamanan nasional, program KTN yang telah dan sedang dibangun oleh seluruh Polda bersama *stakeholder* lain, adalah wujud dan peran nyata Polri untuk melakukan upaya preventif Polri melakukan intervensi terhadap sejumlah kondisi di tengah masyarakat selama masa pandemi agar tidak memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban. Upaya ini diwujudkan dengan ikut mendampingi masyarakat mengidentifikasi, menelaah dan menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang muncul selama masa pandemi dengan dukungan penuh seluruh *stakeholder*.

17. Hasil Analisa

Keberhasilan sejumlah negara dalam mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19, seperti China, Vietnam, Korea Selatan dan Jepang, tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan peran aktif masyarakatnya untuk mematuhi dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam mengatasi pandemi Covid-19. Upaya menyamakan langkah dalam satu kesatuan bangsa dan tidak mengambil sikap dan tindakan sendiri-sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam mengendalikan dan menanggulangi pandemi Covid-19.

Keberadaan Kampung Tangguh Nusantara merupakan salah satu upaya Polri bersama *stakeholder* terkait untuk melakukan intervensi terhadap kondisi sosial masyarakat, yang tidak hanya membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi setiap anjuran dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah guna menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia, namun lebih dari itu, yaitu untuk membangun ketangguhan menghadapi berbagai masalah yang muncul selama pandemi secara mandiri dan tidak selalu bergantung dengan pemerintah. Hal ini penting mengingat

kemampuan yang dimiliki negara terbatas dan semakin berkurang seiring dengan semakin lamanya proses penanganan pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai.

Sekalipun saat dilihat dari fungsi manajemen, masih ditemukan sejumlah kelemahan dan kendala, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian hingga pelaksanaan dan pengawasan, namun secara umum program Kampung Tangguh Nusantara sudah berjalan dengan baik dan nyata terbentuk di lebih dari 24.000 tempat di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut pun akan terus bertambah seiring masih terus digalakkannya pembentukan Kampung Tangguh Nusantara baru di tengah masyarakat. Keberadaan puluhan ribu KTN ini bahkan akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah mempersiapkan ketangguhan dalam mengatasi dan meredam gelombang kedua Covid-19 yang mulai dirasakan sejak bulan Juni 2021.

Saat ini yang diperlukan adalah upaya untuk mengoptimalkan KTN agar mampu memberikan ketangguhan yang lebih besar dan banyak bagi masyarakat. Dalam hal perencanaan misalnya, dengan perencanaan yang lebih matang, didukung dengan kesiapan anggaran KTN akan lebih cepat dapat diimplementasikan. Pada tahap pengorganisasian, dengan merangkul dan melibatkan lebih banyak pihak untuk terlibat, maka anggaran pembentukan KTN tidak perlu memberatkan masyarakat. Keterlibatan banyak pihak juga akan memberikan manfaat ketangguhan yang lebih besar bagi masyarakat. Sementara pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, pendampingan dan pembinaan hendaknya terus dilakukan secara berkesinambungan, dan tidak berhenti pada saat tidak ditemukan lagi warga yang terpapar Covid-19. Hal ini penting agar kedisiplinan warga tidak mengendur karena tidak ada yang tahu berapa banyak gelombang pandemi Covid-19 akan menerpa negeri ini. Sikap dan perilaku gotong royong dan solidaritas terhadap sesama harus terus dibina dan dijaga di tengah masyarakat.

Bagi Polri, pembangunan KTN merupakan wujud nyata intervensi sosial Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membantu masyarakat agar mampu mandiri mengatasi berbagai masalah yang muncul selama

pandemi. Ini merupakan bagian dari langkah Polri mengembangkan upaya preventif terhadap berbagai kondisi yang dapat menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional.



BAB IV

PENUTUP

18. Simpulan

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bencana nonalam yang tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan kekuatan pemerintah semata. Jenis bencana ini membutuhkan penanggulangan yang sifatnya semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat itu sendiri. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat bahkan menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan pandemi Covid-19 secara nasional. Salah satu inisiatif institusi Polri dalam membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 melalui program Kampung Tangguh Nusantara yang sejak Juni 2020 lalu menjadi program unggulan nasional.

Program ini merupakan hasil kolaborasi TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ketangguhan di tengah masyarakat sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi secara mandiri, baik itu dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Semua hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengedepankan kebiasaan gotong royong dan solidaritas kepada sesama yang sejatinya sudah ada di tengah masyarakat dan hanya perlu dibangkitkan kembali.

Program pembentukan KTN yang sudah berjalan sejak bulan Juni 2020 sebenarnya sudah membuahkan keberhasilan. Namun program ini diyakini dapat lebih berdaya guna dan optimal ketika berbagai kelemahan dan kekurangan yang ditemukan, dapat dicarikan solusi penyelesaiannya. Dalam hal perencanaan misalnya, sejumlah kelemahan yang ditemukan adalah waktu perencanaan yang buru-buru dan tanpa disertai dengan dukungan anggaran membuat program ini tidak dapat dijalankan serentak ke semua wilayah di Indonesia dan belum memiliki satu kesamaan standar mutu antara satu KTN dengan KTN lainnya.

Pada tahapan pengorganisasian, secara umum sebenarnya tahapan ini telah berjalan dengan baik. Sinergi dan koordinasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Pada tahapan ini penulis lebih menemukan bahwa sebenarnya tahapan ini dapat lebih optimal

jika program KTN bisa merangkul dan mengikutsertakan lebih banyak pihak di dalamnya. Tujuannya, agar manfaat KTN lebih berdaya guna karena ketangguhan yang didapatkan masyarakat lebih banyak. Salah satu contohnya, menggandeng BNPB untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Hal ini penting untuk membangun kesiapan masyarakat di daerah rawan bencana terhadap munculnya potensi bencana ganda yang bisa sewaktu-waktu terjadi.

Pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, satu hal yang perlu dikritisi hanyalah konsep KTN awal yang menjadikan program KTN berakhir ketika sudah tidak ada lagi warga di dalam wilayah KTN bersangkutan yang terpapar Covid-19. Rancangan ini perlu diperbaiki agar program KTN ini dapat terus mendapatkan pendampingan sekalipun seluruh masyarakat di wilayah tersebut sudah kembali sehat seluruhnya. Kondisi pandemi yang belum berakhir dan potensi berulangnya gelombang pandemi kepada masyarakat seiring terus ditemukannya mutasi varian baru dari virus Corona ini tidak boleh membuat kesiapsiagaan masyarakat menurun. Apa yang terjadi di India harus menjadi pembelajaran. Bagi Polri, upaya memberdayakan masyarakat dan melakukan intervensi sosial terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, merupakan bagian dari tugas Polri untuk melakukan upaya preventif terhadap berbagai kondisi sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional.

19. Rekomendasi

Berkaitan dengan paparan di atas, beberapa rekomendasi konkrit yang dapat disampaikan kepada instansi terkait di antara lain:

- a. Perlunya Korbinmas Baharkam Polri untuk membuat konsep program Kampung Tangguh Nusantara yang awalnya menitikberatkan pada satu desa satu KTN, disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di desa tersebut. Pada desa-desa di pulau Jawa yang padat penduduk, terutama di wilayah perkotaan, KTN sebaiknya diimplementasikan satu RW satu KTN. Hal ini bertujuan agar program KTN menjadi lebih efektif dan efisien.

- b. Perlunya pemerintah daerah untuk membuat perda mengenai KTN agar KTN di daerah memiliki payung hukum yang kuat sehingga pembinaan dan pendaayagunaannya dapat berjalan berkesinambungan, bahkan hingga pandemi Covid-19 bisa teratasi.
- c. Perlunya pemerintah daerah untuk memasukan anggaran pembentukan KTN dalam APBD sehingga KTN bisa diimplementasikan ke seluruh RW/Desa/Kelurahan di Indonesia.
- d. Perlunya menjalin kerjasama dengan BNPB agar konsep Kampung Tangguh Nusantara dapat disinergikan dengan program Kampung Tangguh Bencana sehingga bisa diimplementasikan secara bersamaan guna membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana ganda di sejumlah wilayah rawan bencana alam.

Jakarta, Juli 2021

Penulis


YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO, SH, M.Si
KOMBES POL NRP. 70100400



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Buku-Buku

Deardorff, D.S., & Williams, G. 2006. Synergy Leadership in Quantum Organizations. California: Fesserdorff Consultants.

Fattah, Nanang. 2008. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Gunawan Sumodiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Sutrisno, D. 2005. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Tim Satgas Covid-19 UB. 2020. Pedoman Pengoperasian Kampung Tangguh: Langkah Sistemik Melawan Pandemi Covid-19. Malang: Universitas Brawijaya

Terry, George R. 2005. Dasar-Dasar Manajemen (penerjemah, G.A. Ticoalu).
Jakarta: Bumi Aksara

Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. Manajemen. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press

Jurnal

Firmansyah, MI. 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara BPJS Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga Surabaya, Volume 4, Nomor 2, Edisi Mei-Agustus 2016, Halaman 146-156

Sutrisno, D. 2005. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Website

Laporan Tahunan Presiden RI 2020 bertajuk “Bangkit untuk Indonesia Maju” diakses dari <https://www.presidentri.go.id/assets/documents/laporan-tahunan-2020.pdf> pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> diunduh pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 07.00 WIB.

<https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/10/31/presiden-hidupkan-budaya-tanggung-bencana/> diunduh pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 21.00 WIB.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/094c38353e4aaa6691067abdc34c1d5c.pdf diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 21.00 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/qhvjbi383/sri-kerugian-global-akibat-pandemi-capai-rp-222-kuadriliun> diunduh pada tanggal 12 April 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/01/29/nilai-buruk-penanggulangan-pandemi-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 12 April 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925200741-4-189592/dubes-ri-ungkap-rahasia-sukses-vietnam-perangi-covid-19> diunduh pada tanggal 13 April 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210121/9/1345862/bappenas-total-kerugian-covid-19-hampir-tembus-rp1000-triliun> diunduh pada tanggal 15 April 2021 pukul 22.00 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12-514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/bencana-alam-di-tengah-pandemi-covid-19> diunduh pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi> diunduh pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12-514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal> diunduh pada tanggal 11 April 2021 pukul 20.00 WIB.





LAMPIRAN

TANHANA

DHARMMA

MANGRVA

ALUR PIKIR

PENGELOLAAN KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA DI MASA PANDEMI COVID-19 GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL





RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

DATA PRIBADI

1. NAMA : YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO, SH, M.Si
2. PANGKAT : KOMISARIS BESAR POLISI
3. NRP : 70100400
4. JABATAN : ANJAK MADYA BIDANG BINMAS BAHARKAM POLRI
5. KESATUAN : MABES POLRI
6. TEMPAT/TGL LAHIR : MEDAN / 30 – 10 - 1970
7. SUKU BANGSA : BATAK
8. AGAMA : ISLAM
9. ALAMAT : JLN. KARYA WISATA PERUM LUXOR BLOK C. NO. 31
MEDAN

PENDIDIKAN UMUM

1. SD : THN 1983
2. SMP : THN 1986
3. SMA : THN 1989
4. S1 : THN 2009
5. S2 : THN 2011

PENDIDIKAN POLRI

1. AKADEMI KEPOLISIAN : THN 1993
2. SELAPA POLRI : THN 2001
3. SESPIM POLRI : THN 2007
4. LEMHANNAS RI PPRA LXII : THN 2021

PENDIDIKAN NON FORMAL/KURSUS

1. KURSUS BHS INGGRIS PAMEN POLRI
2. SUSJAB KAPOLRES

PENDIDIKAN KEJURUAN KEPOLISIAN

1. PALAN RESERSE
2. PALAN LANTAS

KEMAMPUAN BAHASA

1. DAERAH : JAWA AKTIF, BATAK AKTIF, MINANG AKTIF
2. ASING : INGGRIS AKTIF

RIWAYAT KEPANGKATAN

1. IPDA : THN 1993
2. IPTU : THN 1996
3. AKP : THN 1999
4. KOMPOL : THN 2004
5. AKBP : THN 2008
6. KOMBES : THN 2016

RIWAYAT JABATAN

1. PAMAPTA C POLRES KENDARI : 1994
2. PAMIN OPS A PUSKODALOPS POLWIL SULTRA : 1995
3. KAPOLSEK KOLAKA : 1995
4. KASAT LANTAS POLRES KOLAKA : 1996
5. KASUBBAG DIKMAS DIT LANTAS POLDA SULTRA : 1998
6. KASAT LANTAS POLRES KENDARI : 1998
7. KAPUSKODALOPS POLRES KOLAKA : 2000
8. PAUR SETPRIPIM KAPOLDA SULTRA : 2000
9. KABAG OPS POLRES PADANG PARIAMAN : 2002
10. KABAG OPS POLRESTA BUKITTINGGI : 2003
11. WAKAPOLRES SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG : 2004
12. KBO DIT SAMAPTA POLDA SULTENG : 2008
13. KABAG BINKAR BIRO PERS POLDA SULTENG : 2008
14. KASUBDIT DIKYASA DIT LANTAS POLDA SULTENG : 2009
15. KASUBDIT GAKKUM DIT LANTAS POLDA SULTENG : 2009
16. KASUBDIT REGIDENT DIT LANTAS POLDA SULTENG : 2010
17. KAPOLRES PARIMO POLDA SULTENG : 2011
18. WAKAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT : 2013
19. DIR BINMAS POLDA SULTENG : 2016
20. DIR BINMAS POLDA SUMUT : 2018
21. ANJAK BINMAS KORBINMAS BAHARKAM POLRI : 2021

RIWAYAT TANDA JASA

1. SATYA LENCANA KESETIAAN 8 TAHUN : 2001
2. SATYA LENCANA KESETIAAN 16 TAHUN : 2009
3. SATYA LENCANA KESETIAAN 24 TAHUN : 2017
4. SATYA LENCANA OPERASI KEPOLISIAN : 2017
5. BINTANG BHAYANGKARA NARARYA : 2018
6. SATYA LENCANA OPERASI KEPOLISIAN : 2019
7. PENGHARGAAN PIN EMAS KAPOLRI : 2017

Jakarta, Juli 2021



YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHU, SH, M.Si
KOMBES POL NRP. 70100400